

SOCIAL JUSTICE

MAGZ

Learning | Leadership | Commitment

Belum Berdaulat, Indonesia Sudah Krisis Energi



Indonesia
Social
Justice
Network

✦ **Akhir Perjalanan IFP
'Mencari Jarum' di Indonesia**

✦ **Revisi UU No. 10/2008, WNI Tak Beridentitas Tak Memiliki Hak Pilih**

VOL02TAHUN01'2013
FEBRUARI

Rp 24.900,00

ISSN: 2302-4230



9 772302 423009



Yang terhormat sahabat ISJN dan para pembaca SJ MAGZ,

Tidak terasa telah 10 tahun International Fellowship Program (IFP) Ford Foundation menjalankan tugasnya mencari 'jarum di ditumpukan jerami' di Indonesia dan 21 negara penerima dana lainnya. Ada awal ada akhir, semoga IFP menjadi model yang terbaik untuk program beasiswa lainnya, demikian Direktur IFP untuk Asia dan Rusia Mary Zurburchen pada Selasa malam 24 Juli 2012 lalu. Pertemuan di Hotel Grand Mahakam malam itu seperti napak tilas refleksi perjalanan IFP, dipenuhi para penoreh dan pelaku sejarah IFP di Indonesia seperti pendiri, pengelola, panelis, dan para alumninya.

Di sela berita suka dan bahagia, berita duka juga menggayuti keluarga ISJN dengan kepergian sahabat terbaik Ratna Dewi Mundingsari, alumni IFP Cohort 4, pada Kamis, 26 Juli 2012 lalu. Mbak Munding, demikian biasa dipanggil, menderita kanker dengan kondisi terakhir stadium empat, meninggalkan dua anak, Zafran (6,2 th) dan Hana (2,8 th). Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT.

Selanjutnya, pada edisi kali ini kita membahas topik mengenai penghematan energi yang barusan diserukan oleh Presiden SBY pada akhir Mei lalu. Ada beberapa hal yang menggelitik ketika Indonesia diserukan harus melakukan penghematan energi. Sekrisis apa pasokan energi negara kaya ini sehingga Presiden menyerukan penghematan energi. Seingat kita, Indonesia sudah menjadi anggota OPEC sejak 1962. Tetapi sejak 2008 Indonesia keluar mengingat telah menjadi importir minyak sejak 2003.

Ironi yang sulit terkatakan, ternyata kekayaan kita tersebut tinggal menghitung waktu yang setidaknya dalam kurun waktu 20 tahun lagi akan habis, jika penggantinya yang baru tidak ditemukan. Mau dicari kemana ya kira-kira?

Padahal negara yang baru berumur 67 tahun ini sedang membutuhkan energi yang banyak untuk pembangunannya ke depan, untuk mengubah kondisinya dari negara berkembang menjadi negara maju. Banyak daerah yang masih gelap gulita di malam hari, banyak anak-anak yang masih belajar di bawah temaram lampu minyak tanah dan lilin. Di sisi lain, kehidupan perkotaan gemerlapan tiada terbatas. Mal dan perkantoran selalu terang dan berpendinginan siang dan malam yang ironisnya juga masih mendapat subsidi dari pemerintah.

Yang menyedihkan sekaligus menyakitkan, 84 persen sektor minyak dan gas bumi energi negara ini usahakan negara lain. Berarti cuma 16 persen yang diusahakan negara melalui Pertamina. Begitulah jika energi di Indonesia dijadikan komoditas komersial, bukan komoditas strategis yang semua orang bisa menguasainya. Padahal jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 jika bumi seisinya adalah milik negara dan diusahakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Dan Indonesia kembali kehilangan kedaulatannya, kali ini kedaulatan energi. (Rafianti)

4 Expose

- > Berjuang Keras dan Pantang Menyerah adalah Kunci Kesuksesan

6 Explore

- > Indonesia Serukan Menghemat Energi | 6
- > Harus Hemat Karena Cadangan Semakin Menipis | 8
- > Cita-Cita Bung Karno dalam Kedaulatan Energi Indonesia | 10
- > Energi Terbaru Solusi Mengatasi Krisis Energi Indonesia | 12

25 ISJN Dynamics

- > Yenny Narny Mengasah Kecintaan Terhadap Indonesia dari Busan, Korean Selatan | 25
- > DR. April H Wardhana dan Kerjasama Penelitian dengan University of Queensland | 27
- > Yusdiana Menjadi Pemantau Internasional di Pemilu Kamboja | 29
- > From IFP to Fullbright: Mission Impossible | 31

41 Sastra SJ

- > Mrs. Esa | 48

Penanggungjawab: Presidium ISJN
Pemimpin Redaksi Nasional: Rafianti
Redaksi: Nelti; Diana Yusdiana; Nur Hasanah; Sepus Fatem; Cut Intan; M Chozin; April Wardhana; Elis Anis
Kontributor: ISJN Members
Layout & Design: Andi Prasetyo
 Alamat Redaksi:
 Jalan SMA 14 No 10 Cawang,
 Jakarta Selatan
 Telp: (021) - 8006458
 Email: isjnmagz@gmail.com
 Website: www.isjn.or.id

Social Justice Magz |



15 From The Field

- > Indonesia Bersiap Ada 300 Lebih Calon Pemimpin yang Lahir | 15
- > Menemukan Mutiara di Lautan dan Jarum di Tumpukan Jerami | 17
- > Memperjuangkan Keadilan Sumber Daya Alam | 20
- > Cerita Serumit di Sinetron | 22

24 IFP International

- > Alumna Wins UK Grant For Marine Conservation Project | 24

33 Perspective

- > WNI Tak Beridentitas Tak Memiliki Hak Pilih | 33
- > Cit-J, Memindahkan Warung Kopi ke Online | 36

38 SJ Solution

- > Keadilan Perempuan dalam Pertanian | 38

44 Book Review

- > Fatamorgana Pendidikan di Indonesia | 44



Foto: Nui

Oleh: Nur Hasanah

Berjuang Keras dan Pantang Menyerah adalah Kunci Kesuksesan

Kisah inspiratif dari Iyehzekiel Parudani

Tidak ada yang tak mungkin, begitulah motto hidup pria kelahiran Toraja, 36 tahun silam yang lihai bermain gitar ini. Iyehzekiel Parudani merupakan salah satu alumni IFP yang saat ini masih berjuang untuk kesejahteraan dan keadilan bagi para tuna netra di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Makasar. Sebenarnya Yeki, begitulah

panggilannya, terlahir tidak tuna netra. Yeki mulai mengalami tuna netra pada umur 7 tahun. Jauhnya tempat tinggalnya membuat keluarganya tidak dapat berbuat apa-apa ketika cacar air yang menyerangnya ketika itu sulit mendapatkan layanan medis. Jadilah Yeki ditangani secara tradisional dan menyebabkan kebutaannya

**ORANGTUA
BERPIKIR MAU
SEKOLAH JUGA
MAU JADI APA,
SEMENTARA ANDA
TUNA NETRA**

hingga saat ini.

Masa kanak-kanak sampai remaja dia habiskan di kampung halamannya, sampai kemudian dia mendapatkan informasi bahwa ada sekolah khusus untuk tuna netra, salah satunya di Makassar. Akhirnya, walaupun Yeki ditentang oleh kedua orangtuanya, dia bersikukuh tetap berangkat ke Makasar dan bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) hingga tingkat SMP. “Orangtua (saya) berpikir mau sekolah juga mau jadi apa, sementara saya tuna netra” ujar ayah dari satu anak ini.

Sekolah tersebut membawa Yeki kemudian berkiprah dan aktif berjuang untuk komunitasnya melalui organisasi. Setelah lulus SMP, dia masuk SMA reguler. Hal ini bukan tidak ada tantangan, berbagai kesulitan dia hadapi dari guru yang mengajar, pihak sekolah, dan juga sistem belajar yang tidak diperuntukkan untuk tuna netra. Tetapi dia tetap berjuang keras agar dapat diterima dengan satu tekad bahwa dia harus bisa bersekolah di sekolah reguler, termasuk bagaimana Yeki harus merubah teks book menjadi huruf braille. Caranya, dengan dibantu temannya dengan membacakan teks book tersebut. Hal ini dia lakukan hingga sampai perguruan tinggi.

Sambil berjuang keras dalam mengikuti sekolah reguler, tidak membuatnya untuk tidak aktif di berbagai organisasi. Yeki pernah menjadi sekretaris di Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni), Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI).

Sekolah di US

Berkat beasiswa Ford

Foundation, Yeki berhasil mendapatkan kesempatan untuk terus berkarya, khususnya di luar negeri. Melalui proses yang tidak sebentar, dia diterima di University of Texas at Austin, jurusan Curriculum Instructor. “Pre Departure Orientation membantu saya untuk mengantisipasi hal-hal yang tentunya sangat menantang, seperti budaya yang sangat berbeda, bahasa, dan juga sistem pendidikan yang jauh berbeda,” ujarnya.

Pre Departure Orientation (PAT) adalah masa orientasi yang diterima oleh semua calon penerima beasiswa terutama mempersiapkan bahasa, pengenalan budaya luar, menulis akademik, dan sebagainya.

Budaya yang sangat berbeda tentu tidak mudah dihadapi, terutama, salah satunya adalah budaya individualise di Amerika. Sebagai warga negara Indonesia, kita terbiasa bersosialisasi dengan teman-teman dan komunitas, sehingga ketika kita dihadapkan dengan budaya individualis, maka hal ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi, Yeki mengaku, budaya yang berbeda tersebut tidak menyulitkannya, karena ternyata warga Texas sangat memomorsatukan para *disable*. Terbukti dengan fasilitas bis yang dapat menurun-naikkan lantainya, kursi khusus yang diperuntukkan oleh *disable*. Selain itu, dalam segi pendidikan, semua fasilitas sangatlah lengkap untuk tuna netra, seperti bacaan yang sudah berbentuk digital book, e-book, dan juga braille. Tetapi Yeki malah mengaku

hal yang paling sulit dia hadapi adalah bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris ala Texas. Menghadapi hal bahasa tersebut, dia aktif mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan bahasanya, misalnya dengan mengikuti *English corner*, aktif menghadiri kebaktian di gereja., serta tetap menggunakan bahasa Inggris dengan *house mate* nya.

Tantangan, Rencana, dan Harapan terhadap Indonesia

Dua tahun kuliah, Yeki menyelesaikannya dengan baik. Ia kembali ke Jakarta, berkumpul dengan keluarganya di Citayam. Seperti yang pernah dihadapi oleh teman-teman alumni IFP lainnya, Yeki pun mengalami *culture shock*. Misalnya budaya yang tidak tepat waktu, kemacetan Jakarta yang semakin parah, ditambah lagi dengan fasilitas transportasi yang tidak dapat diakses oleh tuna netra. Dia menilai, bahwa Indonesia, khususnya Jakarta, masalah sangat jauh dari harapan untuk menghargai orang-orang seperti dirinya. “Kita berharap pemerintah tidak lagi diskriminasi. Implementasi dari undang undang yang sudah dibuat, akan terus kami perjuangkan untuk dapat diterapkan oleh pemerintah. Sehingga tercipta apresiasi masyarakat yang luas, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, dan transportasi. “Saya akan tetap berkiprah dan berkarya di komunitas saya, berjuang di kaum saya, “Kalau bukan kita, siapa lagi.”

Indonesia Serukan Menghemat Energi

Oleh: Rafianti

Indonesia diserukan menghemat energinya. Presiden RI mengumumkan gerakan penghematan energi pada Selasa malam 29 Mei 2012 yang dimulai bulan Juni lalu.

Sebelumnya, pada 11 Agustus 2011 lalu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Sudah separah apakah kondisi Indonesia yang terkenal kaya raya dengan sumberdaya alamnya sehingga Presiden menyerukan gerakan penghematan ini?

Ternyata seruan penghematan energi ini sudah dilakukan dua kali yakni, tahun 2005 melalui Inpres No 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi dan Inpres No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air. Inpres No 2 Tahun 2008 tersebut merupakan penyempurnaan Inpres No 10 Tahun 2005.

Dari laporan yang disampaikan mengenai gerakan penghematan waktu itu, masing-masing instansi pemerintah dapat menurunkan pemakaian energi antara 5 – 20 %. Kota Jakarta saat

itu menjadi kota percontohan dimana kantor-kantor pemerintah di sekitar Monas menjadi target penghematan energi ini. Hasilnya, untuk periode Juni – September 2008, instansi pemerintah di sekitar kawasan Monas telah berhasil menurunkan pemakaian listrik rata-rata sebesar 8.53 persen, sedangkan untuk gedung Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah DKI Kakarta juga berhasil menurunkan pemakaian energi listriknya sebesar 6.97 persen.

Namun setelah itu, ternyata diakui program-program penghematan tidak berjalan efektif dan tetap terjadi pemborosan di sana-sini. Pemerintah dianggap gagal memberikan contoh yang baik bahkan seruan tersebut seperti tong kosong nyaring bunyinya. Di saat Presiden meminta para pejabat pusat maupun daerah memberikan contoh yang nyata dalam gerakan penghematan energi, sederetan iringan mobil-mobil pejabat tetap memenuhi jalanan raya, pun ketika Presiden datang ke daerah, mobil-mobil penjemput seperti tiada batas.

Tidak itu saja, ternyata dalam catatan ASEAN Centre for Energy (ACE), Indonesia

merupakan negara di Asia yang terboros pemakaian listriknya. Contoh pemborosan terbesar di perkantoran atau bangunan publik adalah penggunaan AC dan lampu yang tetap dihidupkan walaupun tidak diperlukan lagi. Menurut Dicky Indarto dari Forum Komunikasi Masyarakat hemat Energi (www.alpensteel.com), Indonesia berpeluang melakukan penghematan energi sebanyak 3,13 juta ton setara dengan minyak.

Strategi Terbaru

Kembali kepada Inpres yang baru, ada lima langkah penghematan yang diserukan Presiden SBY melalui Inpres Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air pada Selasa malam 29 Mei 2012 tersebut, yakni, pertama, mengendalikan sistem distribusi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan tersebut. Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, maka jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis, dan dapat diketahui jumlah pembelian

setiap harinya. “Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumsi BBM khususnya yang bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel, dan penggunaannya pun tepat sasaran. Ingat, BBM bersubsidi hanya bagi mereka yang berhak. Jumlahnya pun harus tepat, sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran dan penyimpanan, yang akan sangat merugikan negara,” kata Presiden. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM, Pertamina akan tetap menjaga pasokan sesuai dengan kuota daerah, tetapi sekaligus menyediakan BBM non subsidi berapapun yang dibutuhkan.

Langkah kedua adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk BUMN dan BUMD. Langkah ini dilakukan dengan cara pemberian stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut. Jajaran pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD diharapkan dapat memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM ini. Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya.

Kebijakan ketiga adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Pelarangan ini juga dilakukan dengan menerapkan sistem stiker. Pengawasan dilakukan oleh

BPH Migas secara terpadu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Harus pula dilakukan kontrol yang ketat di daerah, utamanya di areal usaha perkebunan dan pertambangan, serta industri, atas pelaksanaan ketentuan ini. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi kalangan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan menambah SPBU BBM non subsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut,” kata Presiden.

Kebijakan keempat adalah konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi. Program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG ini, kata Presiden,

harus menjadi program utama nasional. Hal ini sebagai upaya Indonesia mengurangi ketergantungan pada BBM, dan kemudian beralih ke gas, terutama di sektor transportasi. “Pada tahun ini akan dibangun stasiun pengisian gas baru sebanyak 33 stasiun, dan sebanyak 8 stasiun akan direvitalisasi kembali. Untuk langkah awal, mulai tahun ini, pemerintah akan membagikan 15.000 converter kit, atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap, dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” kata Presiden.

Efektivitasnya diversifikasi dan konversi BBM ke BBG, kata Presiden, memang baru akan dirasakan pada tahun



Foto: Diana Coleman

2013 mendatang. Namun, langkah ini dikatakan upaya penting dalam penghematan penggunaan BBM bersubsidi, dan pelestarian lingkungan.

Kebijakan kelima adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan, yang semuanya mulai diberlakukan pada bulan Juni 2012.

“Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program ini. Pada tahun 2008 dan 2009 yang lalu, ketika kita menghadapi kondisi yang relatif sama dengan apa yang terjadi saat ini, gerakan penghematan listrik dan air ini berjalan dengan sangat sukses. Saat itu kita berhasil menurunkan penggunaan BBM dan listrik yang signifikan,” kata Presiden.

Kelima langkah ini, sambung Presiden, akan ditunjang oleh pengetatan pengawasan. Pemerintah akan meningkatkan pengawasan dan menindak tegas setiap penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. “Saya instruksikan kepada BPH Migas agar meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, untuk memastikan tidak ada kebocoran dan penyimpangan dalam distribusi, mulai dari depo sampai ke stasiun pengisian (SPBU), dan di tempat-tempat lainnya,” kata Presiden (serambinews.com). (Rafianti)

Harus Hemat karena Cadangan Semakin Menyusut

Oleh: Rafianti

Indonesia memang wajib menghemat energinya. Pemerintah mensubsidi penggunaan energi dengan anggaran yang juga terus membengkak. Puncaknya adalah ketika pemerintah gagal menaikkan harga BBM bersubsidi.

Anggaran subsidi energi untuk tahun 212 yang ditetapkan sebesar Rp225 triliun bisa membengkak di atas Rp300 triliun dengan terus meningkatnya konsumsi BBM. Bahkan kuota yang ditetapkan APBN Perubahan 2012 sebesar 40 juta kiloliter hanya cukup sampai hari kesepuluh Oktober mendatang (metrotvnews.com).

Data Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) tahun 2008 menyatakan cadangan minyak Indonesia sebesar 8.4 milyar barel per tahun dan diperkirakan akan habis dalam waktu 24 tahun. Jika sekarang tahun 2012, berarti cadangan tersebut akan habis di tahun 2033. Ini dengan asumsi tidak ditemukan sumber cadangan baru. Indonesia juga bukan lagi negara pengekspor minyak. Pada Konfrensi OPEC ke 149 yang diselenggarakan pada 9-10 September 2008 di Vienna, Austria, status keanggotaan Indonesia di OPEC diputuskan untuk disuspensi.

Menurut data DESDM, sejak 2007 ekspor minyak mentah Indonesia rata-rata sebesar 312,7 barrel per hari (bph). Ini

setara dengan besarnya jumlah impor Indonesia yakni 311 bph. Bahkan menurut informasi The Asian Wallstreet Journal, Indonesia sudah menjadi net oil importir sejak Maret 2004. Itu terjadi ketika jumlah minyak yang diimpor untuk keperluan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri sekitar 484 ribu bph, hampir sama dengan jumlah minyak yang bisa diekspor.

Kondisi yang sama dialami bata alam dan gas bumi Indonesia. Data yang sama dari Data Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) tahun 2008 menunjukkan cadangan batu bara Indonesia sebanyak 18,7 milyar ton dengan kapasitas produksi tahunan 250 juta ton. Cadangan ini diperkirakan akan habis dalam 75 tahun. Sementara itu, cadangan gas alam sebanyak 165 TSCF dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 2,7 TSCF dan diperkirakan akan habis terkuras dalam waktu 61 tahun. Kedua cadangan tersebut dengan asumsi Indonesia tidak menemukan cadangan baru dan laju produksi konstan.

Kondisi Kelistrikan Indonesia

Seperti yang dilaporkan sebuah jurnal energi, hingga tahun 2010 kapasitas terpasang pembangkit nasional adalah sebesar 30.941 MW yang tersebar di Pulau Sumatera 4.948 MW, Jawa-Madura-Bali



Dok. Ripos

23.009 MW, Kalimantan 1.175 MW, Sulawesi 1.195 MW, Nusa Tenggara 265 MW, Maluku 182 MW, dan Papua 168 MW.

Sebanyak 83% dari total kapasitas terpasang pembangkit tersebut atau sebesar 25.752 MW dioperasikan oleh PT PLN (Persero), 14% atau 4.269 MW dioperasikan oleh perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer – IPP), dan 3% atau 920 MW dioperasikan oleh perusahaan pembangkit terintegrasi (Private Power Utility – PPU)

Hingga periode akhir Februari 2010, terdapat 26 sistem kelistrikan utama. Dari jumlah tersebut, 15 sistemnya yang berada di Sumbagut, Nias, Tj. Pinang, Bangka, Pontianak, Barito, Sampit, Bontang, Poso, Sulawesi Selatan, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, dan Lombok, mengalami kondisi defisit. Artinya pemadaman sebagian pelanggan di daerah-daerah ini tidak dapat dihindari.

Sementara itu, disebutkan lagi, rasio elektrifikasi saat ini baru mencapai 66% dan rasio

desa berlistrik sebesar 93%. Hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik, yakni mencapai rata-rata 9% per-tahun yang tidak mampu dikejar oleh pertumbuhan pasokan tenaga listrik.

Atas fakta-fakta di atas, penghematan energi menjadi suatu gerakan yang sudah harus dilakukan. Menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan ekonomi negara harus dengan mengkonsumsi energi seperlunya.

Cita-Cita Bung Karno dan Kedaulatan Energi Indonesia

Oleh: Rafianti

Tahun 1957 Presiden Pertama RI Soekarno melancarkan aksi politik kedaulatan modal. Politik ini merupakan alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati, sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia yang saling berkerjasama.

Sejak perlombaan pengaruh kekuasaan meningkat antara UniSoviet dan Amerika Serikat, Soekarno sudah menyadari Indonesia akan menjadi sasaran ekspansi sumber-sumber energi –minyak-- oleh dua negara itu. Dalam pandangannya, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan secara politik tapi soal bagaimana menjadikan rakyat Indonesia yang hidup di dalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya.

Berikutnya, pada tahun 1960, masih dalam aksi kedaulatan modalnya, dengan lebih jelas Soekarno mengungkapkan ambisi terbesarnya menjadikan energi sebagai puncak kedaulatan bangsa. “Gerak adalah sumber kehidupan dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa

yang menguasai energi dialah pemenang.”

Pada peresmian pembelian kapal tanker oleh Ibu Sutowo tahun 1960, Bung Karno dengan lantang berkata, “Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak, heee...joullie (kalian =bahasa belanda) tau siapa yang punya minyak paling banyak, siapa yang punya penduduk paling banya...? Inilah bangsa Indonesia, Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptakan pasar-pasar dimana orang Indonesia menciptakan kemakmurannya sendiri”.

Sejak sebelum kemerdekaan, ada jenis kolonialisme lain yang disadari Bung Karno, yakni penguasaan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia. Soekarno ingin, perkebunan-perkebunan di Indonesia, terutama pengelolaan minyak yang memiliki modal asing dihentikan dan dihancurleburka dengan kekuatan rakyat. Tahun 1960, Bung Karno meminta Djuanda untuk menyusun sebuah regulasi tentang konsesi

minyak yang kemudian dikenal dengan UU No 44 Tahun 1960. Isi kebijakan menyatakan, “Seluruh minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara.” Jelas saja kebijakan tersebut membuat gempar perusahaan minyak asing saat itu dan memukul Multi National Corporation (MNC).

Soekarno menolak ketika tiga perusahaan asing (Stanvac, Caltex dan Shell) meminta Soekarno menarik kembali pemberlakuan UU No 44 Tahun 1960 dan tetap pada perjanjian lama yang disebut “Let Alone Agreement” yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing. Tapi Soekarno dengan tegas menjawab, “Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupakan sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing. UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia.”

Bukan Soekarno namanya ketika perusahaan asing itu

'keukeh' menolak peraturan baru, Soekarno malah bersuara lebih keras. Ketiga perusahaan minyak asing tersebut diminta untuk berpikir, atau Soekarno akan memberikan konsesi pengelolaan minyak pada negara lain yang bisa membagi hasilnya secara adil ke Bangsa Indonesia.

Ambisi terbesar Soekarno waktu itu adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar di dunia. Untuk itu, Soekarno membutuhkan investasi yang cukup besar untuk mengembangkan Pertamina. Maka, ada tiga strategi besar yang dilakukannya yakni, Caltex diperintahkan menyerahkan 53% hasil minyak ke Permina untuk disuling. Caltex diminta memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dolar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang Permina.

Keberhasilan bangsa Indonesia atas kedaulatan modalnya semakin cemerlang ketika Indonesia bisa menang atas Irian Barat yang merupakan lumbung minyak terbesar, selain di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Irian Barat juga merupakan lumbung emas dan gas bumi. Maka, Indonesia pun bersiap menjadi negara paling kuat dan maju di Asia tahun 1975 seperti prediksi Soekarno saat itu.

Obsesi terbesar Sukarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di

dalam struktur modal nasional. Modal nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia, di kalangan penggede saat itu struktur modal itu diberi kode namanya sebagai 'Dana Revolusi Sukarno'. Kelak empat puluh tahun kemudian banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura menggunakan struktur modal nasional dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund (SWF), sebuah struktur modal nasional yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing, salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat (sumber: Nugrahanto, 2012 <http://kfk.kompas.com/blog/view/117915-Bung-Karno-dan-Politik-Minyak-Kita>).

Singkat cerita, mimpi tidak seindah realita. Semua rencana tak selalu berjalan mulus. Idealisme Soekarno menjadikan Indonesia negara hebat secara mandiri melalui kedaulatan energi diplintir dan dikebiri demi kepentingan segelintir golongan. Apa gerangan yang akan dikatakan Bung Karno bila dia tahu bahwa Indonesia kini krisis energi. Bahkan energi yang dimiliki Indonesia pun bukan sepenuhnya dikelola Indonesia, tapi pihak asing.

95 persen dikuasai asing

Seperti yang disebutkan pengamat ekonomi Ikhsan Nurdin Nursi awal Februari lalu, 95 persen sektor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia dikuasai korporasi asing. Chevron mengambil porsi 44

persen, diikuti Total E&P 10 persen, Conoco Phillips 8 persen, Medco Energy 6 persen, China National Offshore Oil Corporation 5 persen, China National Petroleum Corporations 2 persen, British Petroleum, Vico Indonesia, dan Kodeco Energy masing-masingnya satu persen. Sedangkan Pertamina yang notabene asli Indonesia hanya mendapatkan porsi 16 persen."Energi di Indonesia dijadikan komoditas komersial semata, bukan komoditas strategis," kata Pengamat ekonomi dari Econit Advisory Group Hendri Saparini (Republika, 10 Februari 2012).

Jika energi menjadi komoditas komersial, berarti semua orang boleh menguasainya. Ini didukung dengan regulasi yang sangat menguntungkan para pemodal asing. Undang-undang Penanaman Modal dan anak peraturannya menyatakan sektor migas dapat dikuasai asing 95 persen, sementara sektor tambang 90 persen. Yang menyakitkan lagi, seperti disebutkan Pengamat energi Kurtubi kepada Republika di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Jakarta, pengelolaan migas di tanah air adalah yang terburuk di Asia dan Oceania. Hasil survei teknologi global menunjukkan dari 143 negara di Asia, pengelolaan migas di Indonesia ada di posisi 113 di Asia. Di Oceania, pengelolaan migas Indonesia bahkan lebih buruk di bawah Timor Leste (Republika, 10 Februari 2012).

Energi Terbarukan

Solusi Mengatasi Krisis Energi

Oleh Nur Hasanah

Melimpahnya sumber daya alam Indonesia, tak membuat rakyat di negeri ini menjadi makmur, gemah ripah loh jenawi. Baru-baru ini, kita di'paksa' untuk berhemat energi dengan alasan energi yang kita punya semakin menipis, ditambah lagi dengan harga minyak dunia semakin mahal. Jika kita melihat kenyataan di negeri ini, selain Pertamina dan perusahaan swasta nasional, sumber energi fosil kita tentu saja juga dieksplorasi besar-besaran oleh pihak asing. Sebuah ironi memang, bahwa Indonesia yang merupakan negara dengan sumber energi yang sangat melimpah, mengalami krisis energi.

Sebagai penghasil minyak, Indonesia mempunyai sumber minyak sekitar 4.7 billion barrels. Namun, dikarenakan permintaan minyak semakin meningkat, mengakibatkan Indonesia menjadi importir sejak tahun 2004. Produksi rata-rata minyak mentah Indonesia perharinya adalah 944,000 barrels, jumlah ini turun dari rata-rata 967,000 bbl/d pada tahun 2004, dan terus menurun drastis beberapa tahun belakangan.

Kenyataan ini tentu saja akan dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, dikarenakan berbagai peralatan dan mesin industri masih banyak digerakkan dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan perkembangan industri tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber energi yang memadai, dalam hal ini BBM yang dianggap sebagai energi paling murah. Selain faktor ekonomi, penggunaan energi minyak selalu dihubungkan dengan emisi, dimana sumber energi fosil sebagai kontributor utama. Meningkatnya polusi yang dihasilkan dari penggunaan energi dari bahan bakar fosil tersebut akan meningkatkan efek rumah kaca, tentunya akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan iklim global. Oleh sebab itu, perlu adanya energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan terbarukan.

Indonesia kaya akan alternatif energi terbarukan

Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumberdaya alam yang tidak

akan pernah habis, atau berkelanjutan. Energi ini dapat menjadi energi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan sumber energi yang terus meningkat.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di daerah ekuator, dimana mempunyai potensi sumber energi terbarukan yang melimpah semisal panas bumi, biofuel, panas surya (matahari), angin, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut. Selain melimpah dan terbarukan, sumber energi tersebut lebih ramah lingkungan, aman, dan terjangkau secara ekonomi. Walaupun energi ini dapat menjadi solusi terhadap krisis energi yang terjadi di negara gemah ripah loh jenawi ini, tetapi sungguh sangat disayangkan, pemerintah Indonesia belum memanfaatkan kekayaan tersebut sebagai sumber energi alternatif. Kita masih sangat bergantung pada energi berbahan fosil yaitu minyak, batu bara, dan gas bumi. Terbukti bahwa kita baru memanfaatkan energi terbarukan sekitar 5 persen dari total listrik yang digunakan di Indonesia.

Apa saja energy alternatif yang bisa diandalkan itu?

Dari sekian banyak potensi sumber daya alam yang kita miliki, beberapa sumber energi yang paling dapat diandalkan dan potensial untuk dikembangkan adalah energi gas alam, sel surya, mikro hidro, bioethanol, dan biodiesel. Apabila dapat dikelola dengan baik, tidak akan ada isu kekurangan energi ataupun ketidakmerataan jaringan listrik di daerah-daerah terpencil.

Energi gas alam memiliki beberapa keuntungan, di antaranya ramah lingkungan, harga lebih murah, dan cadangan gas bumi yang cukup banyak. Kementerian Energi dan ESDM memperkirakan Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 150 TFC, yang dapat digunakan minimal 60 tahun. Walaupun selisihnya terlampau kecil dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi, sehingga selisih harga belum mampu menutupi biaya pengadaan dan pemasangan converter kit, instalasi, dan tabung gas BBG, tetapi pelan namun pasti, proses konversi minyak tanah semakin menunjukkan sinyal positif. Tingkat konsumsi elpiji juga melonjak sangat berarti, dari hanya 1,1 juta ton pada 2007 menjadi lebih dari 4,7 juta ton pada 2011. Pada forum liquefied petroleum gas (LPG) internasional yang diadakan di Doha, Qatar, negara-negara berkembang lainnya sangat tertarik menjadikan program konversi minyak tanah di



Foto: Rafianti

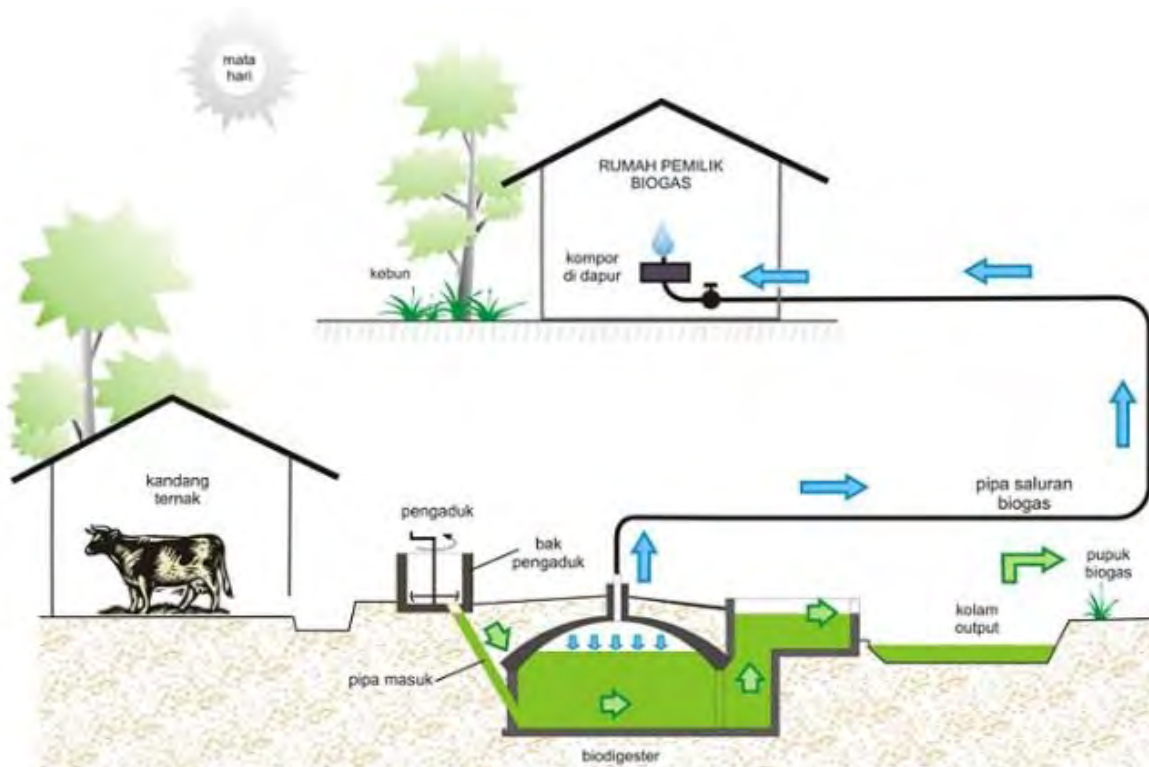
Indonesia sebagai model percontohan.

Patut kita syukuri, bahwa matahari bersinar di tanah air kita hampir 12 jam. Sinar tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif, yaitu Sel Surya. Energi ini menggunakan tenaga sinar matahari yang dapat digunakan untuk satu rumah dengan daya kecil. Sumber energi ini dapat digunakan untuk daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik. Untuk sistem ini dapat meningkatkan pemerataan penggunaan listrik, walaupun memang harus selalu dilakukan pendampingan kepada masyarakat sampai dapat melakukan perawatan secara mandiri serta agar program ini berkelanjutan dan tidak hanya sebatas 'proyek.'

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat memanfaatkan air sebagai energi alternatif. Energi air tersebut antara lain energi potensial air yaitu air terjun, waduk dan danau, yang kedua adalah energi mikro hidro yang berasal dari aliran air, dan yang ketiga adalah energi arus laut dan energi gelombang laut. Untuk

daerah pedesaan yang terdapat sumber aliran air dan jauh dari jangkauan jaringan listrik, energi mikro hidro merupakan sumber energi yang cocok untuk diterapkan. Walaupun daya yang dibangkitkan tidak terlalu besar, tetapi cukup aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu dapat membangkitkan energi listrik. Selain itu, lahan yang dibutuhkanpun tidak perlu besar.

Energi alternatif yang lainnya adalah bioethanol dan biodiesel. Bioethanol sebagai pengganti bensin, dapat diproduksi dari tumbuh-tumbuhan seperti tebu, singkong, ubi, dan jagung. Sedangkan biodiesel berasal dari minyak tanaman seperti kelapa sawit, jarak, kelapa dan lain-lain, juga dengan mudah diperoleh dan dapat dengan mudah dikembangkan di Indonesia. Kedua energi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Walaupun tantangannya adalah bagaimana membangun rantai produksi energi dengan baik dan tepat, dimana mulai dari petani sebagai pelaku utama.



Skema produksi biogas dari kotoran sapi bisa digunakan sebagai alternatif energi untuk skala rumah tangga maupun kamunal.

Strategi apa yang bisa mentrigger agar alternatif energy ini dimanfaatkan secara luas?

Menyelesaikan masalah energi tidaklah mudah, butuh komitmen dan kerja keras dari pemerintah dan segenap masyarakat luas. Perlu dibangun kepedulian masyarakat akan pentingnya energi dan terbatasnya sumber sumbernya, sehingga dalam memanfaatkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang mendukung kampanye energi alternatif. Kebijakan pemerintah masih kurang mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan. Salah satu indikasinya bisa dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi

Nasional, yang menyatakan target konsumsi energi terbarukan di Indonesia pada tahun 2025 hanya sekitar 15 %, artinya 85% masih tergantung pada penggunaan energi berbahan fosil. Padahal PBB menargetkan pada 2030, semua orang di dunia sudah menggunakan energi dari sumber-sumber terbarukan. Untuk mengkampanyekan hal tersebut PBB menetapkan tahun 2012 sebagai Tahun Internasional energi terbarukan. Kenyataannya, kampanye PBB tersebut, nyaris tak terdengar di Indonesia.

Penelitian terhadap sumber-sumber energi alternatif yang terbarukan haruslah terus digali dan dikembangkan. Selain itu, menggerakkan UKM dan para investor baik kecil maupun besar untuk membangun usaha-usaha energi

alternatif yang terbarukan sangat penting dilakukan. Pada saat yang sama, kampanye dan sosialisasi sumber alternatif yang terbarukan kepada masyarakat juga dilakukan, dengan melakukan gerakan penggunaan energi bersih bersama.

Kepedulian masyarakat dan pemerintah terkait dengan kebijakan energi nasional yang bertanggung jawab harus segera dibangun secara bersama agar krisis energi dan ketergantungan kita terhadap energi yang berasal dari fosil segera teratasi. Kita semua harus bersatu mewujudkan energi alternatif untuk masa depan Indonesia.

Indonesia Bersiap, Ada 300 Lebih Calon Pemimpin yang Lahir

Catatan Akhir Perjalanan Beasiswa IFP – Ford Foundation

Oleh: Rafanti

“Indonesia telah memiliki 300 orang lebih alumni yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat, yang akan menularkan motivasinya kepada masyarakat Indonesia.” Demikian Ibu Sisil menutup presentasinya sebagai kesimpulan yang diri dan teamnya persiapkan sebagai laporan akhir ‘perjalanan’ Internasional Fellowship Program (IFP) Ford Foundation.



Selasa malam 24 Juli 2012, bertempat di Hotel Grand Mahakam, Blok M, Jakarta Selatan, menjadi tempat berkumpul segenap para penoreh sejarah dan pelaku atas keberadaan beasiswa International Fellowship Program (IFP), sebuah beasiswa yang dibiayai Ford Foundation dan pengelolanya di Indonesia, yakni IIEF. Hadir pada saat itu Director IFP untuk Asia Russia Dr. Mary Zurbuchen, Direktur IIEF Dr. Diana Kartika Jahja, founder, para panelis nasional, alumni IFP.

Terhitung tahun ini, IFP akan berakhir setelah 10 tahun berjalan. Selama waktu itu, dari 22 negara penerima dana di seluruh dunia, IFP telah berhasil membawa sebanyak 4.338 orang menyelesaikan pendidikan di tingkat master dan doktor, dari total 79.884 pelamar. Program ini menyediakan dana yang tidak tanggung besarnya, yakni 300 juta dollar Amerika.

Sebanyak 4.338 orang tersebut, mereka belajar ke 49 negara dan 645 universitas. “Kebayang ya

bagaimana proses administrasi dan pembayaran uang kuliahnya,” ujar Bu Mary disertai tepuk tangan para hadirin.

Dari sejumlah penerima beasiswa ini, 33 persen memilih belajar di negerinya, 32 persen memilih US dan Canada, 12 persen di Eropa terutama di Belanda dan Spanyol, 20 persen di UK, dan 3 persen di tempat lainnya. Sedangkan bidang ilmu yang paling dominan dipilih adalah environmental health dan applied science, yakni sebanyak 30 persen.

Ibu Mary mengatakan, Program IFP memiliki waktu terbatas yang hanya 10 tahun. Tapi diharapkan bisa menjadi model yang bisa diadopsi oleh para pemberi beasiswa lainnya. IFP ingin penerima beasiswa inclusive, tidak terbatas pada etnis, bidang, umur, gender, dan sosial. Karena selama ini, yang menerima beasiswa malah banyak dari kalangan atas, yang umumnya telah siap secara bahasa dan persiapan akademik lainnya.

Program ini akan terus hidup melalui website yang sedang dibuat. Kontennya akan dibuat alumni sendiri. Sementara itu IFP juga sedang membuat arsip semua alumni dari 22 negara dan file-file arsip tersebut akan menjadi koleksi Columbia University dan semua informasinya bisa diakses untuk kepentingan penelitian. "Jadi jangan heran, kita selalu bolak-balik minta data-data alumni. Karena memang kita sedang mengumpulkan untuk kepentingan tersebut," ujar Bu Mary.

Dalam pemaparannya, banyak sekali hal-hal menarik yang disampaikan Ibu Mary mengenai fakta-fakta penerima beasiswa IFP yang membuat para hadirin cukup terkesima. Contohnya, 91 persen dari penerima beasiswa lahir di luar ibukota atau kota metropolitan, 82 persen merupakan generasi pertama yang bersekolah

tinggi, 73 persen menyatakan hidup dengan kondisi miskin pada saat berumur 16 tahun, 50 persen adalah wanita, dan 37 persen berusia lebih dari 35 tahun.

"Jadi PAT (pre academic training, red) sangat penting bagi para fellow mempersiapkan pendidikannya ke luar negeri," ujar Bu Mary.

Lebih lanjut, hasil dari program IFP ini adalah: 91 persen IFP Alumni berhasil meraih gelar pendidikannya; 82 persen kembali ke negaranya, 90 persen yang masih di luar negeri sedang melanjutkan doktoralnya; 93 persen adalah pegawai; 90 persen alumni melaporkan bahwa pekerjaannya berhubungan dengan sosial komitmen seperti yang disampaikan di formulir aplikasinya.

Di Indonesia, Penerima Beasiswa IFP 1:100

Menjadi catatan dari Ibu Sisil dan rekan-rekan, bahwa IFP memiliki beberapa keistimewaan dibanding para penyedia beasiswa lainnya. Kebanyakan, perguruan tinggi lebih menekankan prestasi akademis, demikian juga penyedia beasiswa yang lebih mengutamakan nilai IPK. Padahal selain itu, banyak sekali individu-individu yang besar dari pengalaman-pengalaman di lapangan, yang lebih potensial untuk

di'cerdas'kan karena mereka bersentuhan langsung dengan masalah di lapangan. Penyedia beasiswa lainnya juga memiliki akses terbatas bagi kaum disabel. "Beasiswa yang lain umumnya memiliki persyaratan yang tinggi, terutama untuk bahasa Inggris, padahal English is simply a tool," katanya.

Di Indonesia, persaingan mendapatkan beasiswa IFP ternyata 1:100. Ada 50.000 yang melamar, dan hanya sekitar 300 lebih yang dinyatakan menjadi IFP Fellows. Ke 300-an orang ini, menurut analisa Ibu Sisil dan rekan-rekannya, memiliki karakter; inquisitive mind, great disire or ambition to change the situation, being responsive to change, perseverance to successfully complete the study, using every possible opportunity to establish network dan to empower themselves, ability to set priorities, developing oral, written, and negotiation skill, and understanding the strategies.

Dari segala kelebihan IFP, ada salah satu fenomena sosial cukup menarik yang terjadi di kalangan alumni IFP yakni, perceraian yang umumnya terjadi akibat perbedaan tingkat pendidikan pasangan, suami atau istri. Namun yang kebanyakan terjadi adalah, ketika tingkat pendidikan istri menjadi lebih tinggi dari suami. (Rafianti)



Foto: Elis

Menemukan Mutiara di Lautan dan Jarum di Tumpukan Jerami IFP berbagi di @America

Oleh Elis dan Yusdiana

Bersamaan dengan hari pendidikan Nasional, 2 Mei 2012 Indonesian International Education Foundation (IIEF) bekerjasama dengan @America (American Cultural Center) menyelenggarakan Talkshow and Discussion yang bertajuk “Visions into Actions”, bertempat di @america, Pasific Place, Central Business District Sudirman, Jakarta. Acara ini sebagai wujud keprihatinan terhadap persoalan kepemimpinan di Indonesia dan pentingnya memunculkan

pemimpin-pemimpin lokal di Indonesia. Acara yang berdurasi sekitar 1.5 jam ini dipandu oleh wartawan senior Kompas, Maria Hartiningsih. Menghadirkan pembicara internasional, Direktur IFP Asia dan Rusia Dr. Mary Zurbuchen, juga tiga alumni Program Beasiswa Ford Foundation International Fellowship Program (IFP): Tolhas Damanik, difabel dan bergerak di bidang pendidikan), Mareska Mantik berfokus pada penguatan demokrasi di Indonesi, dan Muhammad Jailani yang merupakan dDosen

dan aktifis Hak Asasi Anak dan Perempuan.

Acara yang terbuka untuk umum ini diikuti oleh sekitar 100 orang, diantaranya Direktur IIEF Dr. Diana Kartika Jahja, Country Representative Ford Foundation Mr. David Hulse, Dosen Universitas Ohio Amerika Prof. Gene Amarell, Presidium Indonesian Social Justice Network (ISJN), beberapa alumni dan fellow International Fellowship Program ((IFP), staf pengajar UI, anggota @america

dan peserta umum dari berbagai kalangan.

Beasiswa International Fellowship Program (IFP) yang didanai oleh Ford Foundation telah menghantarkan lebih dari 300 orang ke jenjang pendidikan tinggi (S2 dan S3). Sebagaimana disampaikan oleh Dr Mary Zurbuchen, IFP telah memberikan beasiswa kepada 367 individu yang memiliki potensi akademik dan kepedulian sosial yang luar biasa. “Dengan demikian, jumlah penerima beasiswa dari Indonesia adalah yang terbesar di dunia,” katanya disambut tepuk tangan antusias yang hadir malam itu.

Lanjutnya, penerima beasiswa IFP berasal dari tempat-tempat yang sulit memiliki akses untuk melanjutkan ke jenjang S2/S3. Dr Mary juga memberikan presentasi tentang bagaimana pendidikan mempengaruhi kapasitas kepemimpinan seseorang. Maria menambahkan, bahwa IIEF telah berhasil menemukan banyak mutiara-mutiara yang tersebar di daerah pedalaman, di dekat hutan, dan daerah terpencil lainnya. Dalam kesempatan tersebut, tiga orang perwakilan alumni penerima beasiswa IFP membagi pengalamannya selama menempuh pendidikan di luar negeri, dan bercerita tentang kiprah di dunia pekerjaan yang sedang mereka geluti.

Tolhas, penerima beasiswa IFP angkatan ke 5 menyelesaikan studi master nya

selama 2 tahun di Universitas Ohio, 6 bulan lebih cepat dibandingkan teman-teman lainnya. Bagi Tolhas, beasiswa IFP yang mengakomodir orang-orang berkebutuhan khusus merupakan beasiswa istimewa dan “user friendly”. “Selama ini teman-teman yang berkebutuhan khusus merasa sekolah saja susah, apalagi mendapatkan beasiswa,” ujarnya. IFP telah membuka peluang kepada para difabel mendapatkan beasiswa studi lanjut. Selama studi di Amerika, Tolhas tidak mengalami banyak kesulitan karena banyak di bantu oleh Disability Services. Tolhas juga menyampaikan bahwa ketika dirinya menyampaikan ke pihak Universitas Ohio tentang beberapa hal yang kurang accessible, pihak Ohio mengganti semua fasilitas dengan fasilitas yang baru, agar bisa memenuhi kebutuhan khususnya. Bagi Tolhas, di Universitas Ohio, dia tidak hanya belajar, tapi juga menjadi advocate untuk persoalan-persoalan kebutuhan khusus.

Penerima beasiswa lainnya, Muhammad Jailani dari Medan Sumatra Utara menyelesaikan studi masternya di Universitas Hawaii dan harus mengikuti program bahasa Inggris beberapa bulan di Jakarta dan juga di Hawaii. Pada saat mendaftar TOEFL nya hanya 400. Sedangkan beasiswa lainnya biasanya mensyaratkan 550. Di Hawaii yang sangat kental sekali keragaman masyarakat dan budayanya, Jailani merasa banyak belajar, tidak hanya secara

akademis, namun juga belajar soal karakter. Bagaimana saling menghormati, saling mendukung satu sama lain, serta bagaimana orang-orang dengan kewarganegaraan yang berbeda bekerja sama satu sama lain.

Mareska Mantik, lulusan Brandeis University, Inggris, yang berasal dari Manado mengaku mengalami suatu “turning point” dalam hidupnya ketika selama beberapa minggu tinggal di daerah terpencil di Kalimantan dan menemukan kenyataan bahwa masih ada orang Indonesia yang tidak tahu siapa Presiden Indonesia kala itu dan bahkan tidak paham di negara mana dia tinggal. Tentu hal ini sangat kontras dibandingkan dengan kemajuan teknologi dan pesatnya informasi yang dinikmati masyarakat Indonesia lainnya. Hal itulah yang membuat Mareska ingin berjuang menguatkan demokrasi di Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya, Mareska kembali ke Indonesia dan bergabung dengan NGO internasional, bekerjasama dengan pihak pemerintah dan berbagai pihak untuk menguatkan demokrasi di Indonesia.

Beberapa peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para sumber. Diantaranya pertanyaan tentang upaya apa yang telah ditempuh oleh Tolhas untuk memperbaiki kondisi pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang berkebutuhan khusus. Tolhas

pun menerangkan, dirinya bersama dengan teman-teman terus berjuang demi keadilan infrastruktur, kebijakan politik, terutama dengan

Maria Hartiningsih, di akhir acara, menyampaikan bahwa acara ini telah memberikan koreksi terhadap apa yang terjadi dengan dunia pendidikan di Indonesia. Sedangkan Dr. Mary Zurbuchen, menyampaikan bahwa acara ini telah memicu banyak pertanyaan untuk menjadi refleksi bersama tentang pendidikan di Indonesia dan juga tentang impian dan masa depan generasi muda Indonesia.

Silaturahmi dengan Ibu Mary di Indonesia

Selain menghadiri talkshow di @america, Ibu Mary –sapaan akrab Dr. Mary Zurbuchen—melakukan kegiatan diantaranya bertemu alumni di Jakarta, Yogyakarta, dan Makasar. Pada rangkaian kegiatan tersebut Ibu Mary mengekspresikan rasa bahagianya karena sekarang para alumni telah berkembang

pesat baik secara akademik maupun professional. Para penerima beasiswa IFP berhasil menyelesaikan studi di bidang masing-masing serta berkiprah di tengah masyarakat mengabdikan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Ibu Mary menilai IIEF telah berhasil mengelola program beasiswa ini karena penerima yang sebelumnya dinilai banyak orang sebagai kaum marginal/terpinggirkan dan dianggap susah memiliki peluang untuk bersekolah tinggi serta tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris – berhasil menuntaskan pendidikan dan tidak terkendala dengan bahasa.

Ibu Mary juga mengapresiasi adanya Indonesia Social Justice Network (ISJN) sebagai wadah para alumni untuk berkreasi dan mengembangkan ide-ide bersama. Menurut beliau, sebenarnya jaringan ini adalah jaringan dalam jaringan. Setiap individu alumni memiliki jaringan dan dalam ISJN mereka semua berjejaring lagi. Beliau berharap agar cerita-

cerita seputar alumni, ISJN dan IFP bisa disebarluaskan melalui website sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa mengambil manfaat dari adanya jaringan ini.

Lebih lanjut Ibu Mary menjelaskan bahwa saat ini IIEF Indonesia sedang dalam tahap penutupan beasiswa IFP dan sedang menyusun Country Final Report. Alumni diharapkan dapat berperan dalam proses ini misalnya dalam survey atau kebutuhan informasi lainnya yang diperlukan oleh IIEF.

Sebagai pribadi, Ibu Mary berkeinginan untuk kembali ke Indonesia menulis tentang IFP dan alumni dan mengenai knowledge system di Indonesia. Beliau ingin mengadakan penelitian mengenai bagaimana kesempatan belajar di luar negeri telah membantu para alumni untuk berkembang dan menjadi pemimpin baru di Indonesia.

Foto: Elis



Memperjuangkan Keadilan Sumberdaya Alam

Oleh: Nur Hasanah

Atas sponsor dari Russell E. Train Education For Nature Program (EFN) World Wildlife Fund (WWF)-Washington DC, akhirnya saya berangkat ke negeri kincir angin, Belanda untuk mengikuti international short course “Competing Claims on Natural Resource” selama dua minggu, yang diadakan oleh Wageningen UR Center for Development Innovation, dari tanggal 20 Februari-3 Maret 2012 dengan berlokasi di hotel Hof Van Wageningen, Belanda. Peserta short course terdiri dari 14 peserta yang berasal dari 12 negara dari negara berkembang, antara lain Indonesia, Uganda, Zambia, Tanzania, Etiopia, Bangladesh, Philipine, Mongolia, Tanzania, Kenya, Nigeria, dan India. Dua orang dari Indonesia, yaitu saya dan Susi Ramadhani, dosen Universitas Bengkulu.

Secara umum, short course ini bertujuan sebagai kontribusi mereka terhadap pembangunan yang lebih adil, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, dan konservasi keanekaragaman hayati secara global dengan membangun dan meningkatkan kapasitas para praktisi manajemen sumber daya alam agar mampu menganalisa ‘competing

claims’ sumber daya alam dan mengelola konflik kepentingan sebagai ‘driver’ perubahan sosial.

Bagi saya, pelatihan intensif dua minggu ini cukup bagus dan menarik. Menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan dan pengembangan keterampilan secara interaktif, menciptakan metodologi seperti pengembangan skenario serta praktek studi kasus.

Minggu Pertama

Minggu pertama diawali dengan kuliah singkat yang disampaikan oleh Professor Ken Giller, salah satu professor di Wageningen University yang menjelaskan dan memperkenalkan definisi dari konflik sumber daya alam dengan mengambil studi kasus di Afrika. Beliau telah banyak melakukan penelitian tentang hal tersebut di kawasan Afrika Selatan, dan Zimbabwe.

Pada minggu pertama, kami diminta untuk mempresentasikan kasus yang sedang kami kerjakan di daerah kami masing-masing. Saya sendiri, mempresentasikan konflik sumber daya alam antara masyarakat dengan pihak taman nasional,

perusahaan Chevron dan pengusaha perkebunan teh di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Presentasi ini bertujuan untuk mencari kasus yang paling menarik untuk kami praktikkan bersama sebagai studi kasus yang harus kami selesaikan pada hari terakhir short course dengan mengaplikasikan teori-teori yang akan kami dapatkan dalam waktu dua minggu.

Studi kasus yang dipilih antara lain; Pembangunan DAM di India, Studi kasus Tana River, Kenya, dan Studi kasus konflik sumber daya air di Tanzania. Saya dan tiga orang lainnya mendapatkan studi kasus Tana River, Kenya, sebuah tanah yang tak bertuan yang didiami oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, antara lain pengusaha kelapa sawit, nelayan, pengembala, turis, pemerintah, pelaku pelabuhan, dan petani. Jadi bisa dibayangkan begitu kompleksnya konflik sumber daya yang terjadi di daerah tersebut.

Selain itu, kami juga belajar tentang analisis stakeholder, Analisis kekuatan (power analysis), dan konflik dengan menggunakan “Rich Picture”, sebuah gambar besar, untuk

memudahkan kita memetakan kompleksnya konflik sumber daya alam pada kasus-kasus yang telah dipilih. Beberapa teori tentang metode dalam bernegosiasi beserta role playnya, juga Participatory Evaluation.

Kami juga diajak untuk berkunjung ke Delta DAM project, tanggul terhebat yang pernah saya kunjungi. Tanggul tersebut adalah salah satu tanggul di Belanda dalam mencegah tenggelamnya

wilayah mereka, dimana banjir bandang telah menenggelamkan wilayah mereka pada tahun 1953. Kita semua tahu bahwa lokasi daratan Belanda berada di bawah permukaan laut. Tetapi tujuan utama kami berkunjung kesana adalah untuk mengetahui konflik yang terjadi ketika tanggul tersebut akan dibangun.

Minggu Kedua

Minggu kedua kami belajar tentang cost-benefit analisis terhadap layanan lingkungan.

Teori tersebut melatih kita untuk menganalisa keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan jika kita merubah ekosistem. Kami juga berlatih untuk me-review institusi yang menghambat ataupun mendukung proses negosiasi dalam competing claims. Tidak itu saja, kita juga belajar tentang scenario planning sebagai alat inovatif untuk mengatasi konflik yang sangat kompleks. Materi ini memuat langkah-langkah dan strategi yang paling tepat melalui



Foto: Nui

pendekatan-pendekatan yang telah diajarkan sebelumnya dan dengan menggunakan rich picture.

Hari terakhir dikelas, kami presentasi studi kasus yang telah diberikan. Kami menyuguhkannya dengan memasukkan berbagai analisis konflik, stakeholder, dan rencana strategi apa yang kami ajukan untuk mengurangi konflik sumber daya alam yang ada.

Kursus intensif dua minggu ini menyajikan sinergi antara teori dan praktek yang sangat interaktif. Mengikuti kursus singkat ini, tidak hanya meningkatkan keilmuan saya sebagai praktisi dan juga akademisi, tetapi juga memperluas jaringan dengan berbagai negara. Tidak hanya itu, jika kita ingin refreshing, kita punya kesempatan untuk travelling keliling Eropa. Saya sendiri, menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa

kota di Belanda, dan Brussels ('The Capital city of Europe') serta Stockholm (Swedia).

Jika Anda tertarik untuk mengikuti short course tersebut, Anda tinggal mendaftar ke CDI Wageningen, dan jika sudah mendapatkan admission letter, Anda dapat melamar beasiswa NFP ataupun EFN-WWF yang saya sebutkan di atas.

Saat saya masih sekolah, saya tidak pernah berpikir untuk aktif di dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun sejak kecil, saya berpikir bahwa ternyata menjadi orang miskin itu sangat susah hidup di negara ini. Mereka terbatas akses mereka terhadap informasi, pendidikan, ekonomi dan masih banyak lagi, yang pada akhirnya menyebabkan mereka tidak bisa lepas dari kungkungan kemiskinan tersebut. Itu terjadi tidak hanya dalam satu generasi namun bisa terjadi ke dalam beberapa generasi. Mereka akan ada dalam kungkungan kemiskinan tersebut selama tidak ada upaya keluar dari generasi itu sendiri atau tidak

bisa membantu orang lain keluar dari kemiskinan. Dan menjadi guru adalah menjadi 'orang lain' yang membantu orang untuk keluar dari persoalan kemiskinan.

Lain dulu lain sekarang. Saat saya berinteraksi dengan teman-teman gerakan mahasiswa, mulai berkenalan dengan LSM, membaca berbagai literature yang sempat saya peroleh, pikiran saya mulai berubah bahwa aktor penting yang paling bertanggung jawab untuk pengentasan kemiskinan adalah negara melalui perangkatnya. Sementara orang-secara pribadi sebagai anggota masyarakat- hanya bersifat membantu. Pendidikan adalah penting tapi pendidikan harus dipahami dalam arti luas,

saat saya tergabung dalam sebuah LSM lokal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, saya sempat tergabung dalam lembaga yang bekerja di isu pemberdayaan politik masyarakat pedesaan di Yogya dan kerja sampingan yang bersifat kontrak jangka pendek di beberapa proyek penelitian. Empati, pengalaman kerja dan sekolah, semua memberi pengalaman hidup dan semakin menajamkan pembacaan saya secara pribadi terhadap berbagai macam persoalan yang terjadi di sekeliling saya – yang tentunya membutuhkan kemampuan untuk mencari pemecahan masalah, baik secara individu maupun berkelompok.

Ceritanya Rumit Seperti di Sinetron

Catatan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dari Magelang Oleh: Wariyatun

ada intervensi dari luar yang memfasilitasi mereka keluar. Pertanyaan saya kemudian, siapa yang harus melakukan intervensi pada sebuah generasi untuk keluar dari kemiskinan dan bagaimana caranya? Saat saya kecil, saya berpikir bahwa pendidikan (formal) adalah cara yang strategis untuk keluar dari kemiskinan sebab pendidikan yang berhasil idealnya akan merubah pola pikir seseorang dalam menghadapi persoalan hidup. Sebuah pemikiran yang sederhana tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi hipotesa kecil saya. Cita-cita kecil saya yang keluar saat itu adalah menjadi guru ke daerah terpencil. Saya berpikir, orang lain-lah yang

tidak hanya pendidikan formal tapi bisa juga informal.

Perasaan empati tersebut, ternyata tidak berhenti sebatas persoalan kekerasan saja. Diskusi dengan teman, pembacaan terhadap berbagai sumber, berbagai aktifitas formal dan informal seperti kuliah dan travelling ternyata menyebabkan subur dan meluasnya perasaan empaty terhadap persoalan yang lain. Perasaan itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar saya terjun dalam kerja-kerja kemanusiaan, termasuk bekerja di isu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Aktivitas ini saya mulai dari tahun 2005 hingga sekarang

Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan ; dari Sinetron ke Kenyataan Sehari-Hari

Saat saya belum terlibat aktif dalam isu kekerasan terhadap perempuan (KtP), saya tidak berpikir bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan serius. Ya, seperti kebanyakan orang awam, kadang saya mendengar atau melihat sebuah keluarga konflik (cekcok) atau melihat berita perkosaan atau pembunuhan (yang bersumber dari rentetan persoalan diskrimansi gender dalam masyarakat) di televisi. Semua itu saya anggap hal yang biasa dan sering lepas dari ingatan setelah tayangan usai, tidak ada yang istimewa.

Namun setelah saya bergabung dalam lembaga yang bergerak di isu tersebut (pada awalnya saya mulai bekerja sebagai konselor perempuan korban kekerasan), pikiran saya berubah; dari menganggap kekerasan berbasis gender (GBV) itu persoalan biasa, menjadi GBV adalah persoalan yang butuh pemikiran serius dan komprehensif. Setiap kasus, memiliki metode penyelesaian yang berbeda karena perbedaan jenis dan bentuk kekerasan, akibat, latar belakang sosial-ekonomi-budaya dan psikologis korban. Bagai terhenyak dari mimpi, begitu selesai konseling, dulu saya sering baru sadar, “O, kok ada ya orang yang bisa melakukan tindakan seperti itu? O, kok ada ya, orang yang nasibnya seperti itu?” Dan semua itu riil, ada di sekeliling kita, orangnya ada di hadapan saya dan baru saja selesai bercerita bukan khayalan atau cerita seperti di sinetron.

Well, ternyata hidup memang tidak ada yang sempurna, roda kehidupan itu selalu berputar. Mereka (para korban itu) adalah orang-orang yang tangguh, yang telah membuktikan bahwa hidup itu tidak linear dan dengan segala keterbatasan yang ada, mereka berhasil bertahan dari kekerasan yang mereka alami bahkan ada yang mampu menjadi hidup lebih baik daripada kehidupan awal sebelum kekerasan menimpa mereka. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pernah saya tangani, sering saya melihat begitu rumitnya persoalan pada korban. Misalnya, korban adalah perempuan miskin dengan beberapa anak yang menjadi tanggungannya dan dia mengalami multiple kekerasan (fisik, psikis, ekonomi) dalam satu waktu. Untuk

membantu menyelesaikan kasus semacam ini, tentu dibutuhkan skala prioritas dan strategi yang harus diskusikan dengan korban. Bukan hal yang mudah berdiskusi dengan orang yang sedang labil dan trauma atas kekerasan yang dialami. Di tahap awal, biasanya saya atau teman-teman konselor lain hanya mampu menjadi pendengar keluh kesah persoalan mereka. Tahap ini bisa memakan waktu berhari-hari, berbulan bahkan bertahun.

Antara Membantu dan Ketergantungan

Harus dipahami bahwa melakukan kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan sumber daya (baik finansial maupun manusia) yang banyak. Oleh karena itu, jaringan dan sumber pendanaan menjadi penting. Pertama, jaringan bisa diperoleh baik dari masyarakat umum, LSM, Community Based Organisation (CBO) maupun pemerintah. Jaringan bisa bersifat cair tapi juga bisa bersifat ketat. Upaya kerja berjaringan ini sebenarnya juga telah diatur dalam undang-undang tetapi tantangan yang ada adalah tidak semua elemen yang bisa diajak berjaringan ‘tertarik’ dan ‘menganggap penting’ isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akibatnya keterlibatan dan support mereka pun minim. Kedua, pendanaan. Ada tiga sumber dana yang bisa digali untuk kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan; 1) negara (sebagaimana tertuang dalam UU), 2) swadaya masyarakat dan 3) hibah dari lembaga-lembaga donor. Sejauh ini, harus diakui bahwa hibah dari lembaga-lembaga donor menjadi sumber pendanaan yang dominan dibanding kedua sumber pendanaan

yang disebutkan sebelumnya terutama bagi LSM yang bergerak pada isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Ada sisi positif dan negatif dari kondisi ini. Sisi positifnya adalah lembaga mampu melakukan kerja-kerja kemanusiaan bagi perempuan korban kekerasan secara lebih luasa (dalam arti cakupan penerima manfaat dan variasi program kerjanya). Sementara sisi negatifnya adalah timbulnya ketergantungan lembaga terhadap lembaga donor dalam hal finansial dan yang lebih parah adalah dalam hal ide perubahan (yang biasanya tertuang dalam visi misi lembaga). Tidak jarang kita mendengar ada lembaga non-profit yang mengalami krisis keuangan, bahkan berhenti beroperasi karena ketiadaan dana. Sementara di sisi lain, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi terus menerus, korban berjatuh dan membutuhkan bantuan. Kondisi semacam ini menjadi sebuah kondisi dilematis bagi LSM, terutama yang langsung bergerak di tingkat masyarakat bawah (grass root) dan memberikan layanan langsung bagi penerima manfaat program (misal : perempuan dan anak korban kekerasan). Untuk mengakhiri tulisan ini, saya hanya ingin melontarkan sebuah pertanyaan : bisakah kita melihat kembali, modal sosial apa yang kita miliki dan bisa kita gunakan untuk menggantikan ‘peran dana’ dari lembaga donor untuk kerja-kerja kemanusiaan termasuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan? Bisakah kita tidak tergantung pada lembaga dalam arti fisik (e.g bekerja pada lembaga tertentu) dalam kerja-kerja kemanusiaan yang lebih terorganisir?

Alumna Wins UK Grant for Marine Conservation Project

Photo:

Darwin Initiative Project Launch. Clockwise: Ms. Yna Molina (Research Assistant), Dr. Margarita N. Lavides (IFP Alumna, Project Coordinator), Her Majesty's Ambassador Stephen Lillie (United Kingdom), Dr. Nicolas V.C. Polunin (Project Leader, Newcastle University) and Mr. Gregorio Ditto De La Rosa (Program Staff).



Sumber: <http://www.fordifp.org/>

IFP alumna Dr. Margarita N. Lavides recently won a \$20P million (\$456,000 US) grant from DEFRA (Department of Environment, Food, and Rural Affairs) in the UK for a conservation project that aims to preserve corral-dependent fish species in the Philippines. Called the Darwin Initiative Project, it originated with Margarita's PhD thesis research findings, which she conducted while earning her doctorate in Marine Science at Newcastle University with support from an IFP fellowship.

The Darwin Initiative Philippine Project is focused on "Responding to Fish Extirpations in Global Epicentre of Marine Biodiversity." Research for Dr. Lavides' PhD thesis detected local extinctions of several finfish species in two small islands in the Philippines.

Professor Nicholas Polunin, Dr. Lavides' former PhD supervisor, saw the value of her thesis outcome; both then decided that her PhD study should be tested more widely in locations throughout the Philippines.

Professor Polunin and Dr. Lavides applied for the DEFRA grant in 2011, and in April 2012, they achieved their goal. The Darwin Initiative Philippine Project will be rolled over into 5 key marine biodiversity areas (mKBAs), including Verde Island Passage, Palawan, Danajon Bank (Bohol), Pollilio Island and Lanuza Bay (Surigao del Sur). Her Majesty's Ambassador Stephen Lillie (UK) attended the Project Launch at Ateneo de Manila University on May 12th.

The project encompasses several objectives: identify threatened or locally extinct fish

species in these 5 mKBAs using fishers' knowledge, underwater visual census surveys, and fish landings' current and historical data; ascertain temporal abundance trends and model changes of abundance over time of finfish species and groups in 5 mKBAs; enhance capacity in resource management of local stakeholders (Lanuza Bay); reconcile conservation needs with sustainable livelihoods; and make policy recommendations at local, national and international levels.

In 2011, Margarita received an award from Ateneo de Manila University for Outstanding Scholarly Work for Science and Engineering. Her paper was published in the Cambridge Journal of Environmental Conservation.

Yenny Narny Mengasah Kecintaan terhadap Indonesia

Oleh: Nelti

dari Busan, Korea Selatan



Di awal tahun 2012 Yenny Narny, alumni IFP cohort 3 mendapat tantangan kerja yang cukup menarik dari Universitas Andalas tempat dimana dia bekerja. Tantangan itu adalah mengajar di Busan University of Foreign Studies (BUFS),

Busan, Korea Selatan. “ Saya diminta mengajar mata kuliah Kebudayaan dan Politik di Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris untuk mahasiswa di Jurusan Malaysia/Indonesia. Sebuah tawaran yang memikat karena biasanya perjalanan keluar

negeri saya lakukan adalah untuk melanjutkan studi ataupun menghadiri seminar” ungkapnya.

Berangkat pada awal semester 2012, tepatnya diakhir Februari untuk masa tugas 1 tahun, Yenny disambut dengan cuaca dingin yang menggigit dan langsung dihadapkan dengan ritme mengajar yang padat. Di sela-sela mengajar dia juga membimbing mahasiswa di sana dalam memahami budaya dan politik di Indonesia. “Untuk membangun interaksi yang baik antara mahasiswa, saya dan salah seorang dosen yang juga dari Indonesia, membangun komunitas yang diberi nama Mari Belajar Indonesia. Komunitas ini memberikan ruang interaksi yang lebih informal bagi mahasiswa dan staf pengajar dari Indonesia dalam membangun pengertian dan memahami Indonesia secara lebih baik. Basis utama dalam interaksi ini terjalin melalui jaringan sosial Facebook” jelasnya.

Dalam setengah tahun perjalanan mengajarnya di BUFS, dia mencatat beberapa hal yang menarik tentang masyarakat Korea Selatan. Pertama, kepentingan negara

adalah hal yang utama. Apapun pekerjaan mereka baik itu pemerintahan, swasta ataupun lembaga non profit haruslah berorientasi pada kepentingan negara. Demikian pula di kalangan akademisi. Penelitian haruslah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan skill, bahkan studi tentang Hak Asasi Manusia-pun harus diarahkan bagi kepentingan seluruh masyarakatnya. Tidak mudah untuk mendapatkan data ataupun cerita tentang tragedi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan di masa lalu, bahkan dari kalangan akademisi sekalipun. Namun sebaliknya para akademisi di universitas ini memahami dengan baik tragedi kekerasan yang terjadi dibanyak tempat di dunia.

Kedua, bela negara dalam artian persiapan fisik dan mental menjadi bagian penting berikutnya bagi masyarakat Korea Selatan. Kaum muda-nya diwajibkan untuk mengikuti latihan militer untuk mempersiapkan diri dari kemungkinan ancaman perang dengan negara tetangga. Suatu sikap yang bisa dimaklumi karena negeri ini masih terlibat konflik dengan Korea Utara, yang notabenehnya merupakan saudara mereka sendiri yang terpisah karena kepentingan politik dan ideologi. Selain itu negara ini dipagari oleh Jepang dan China yang memiliki sejarah sebagai penjajah Korea di masa lalu.

Ketiga, sepanjang pengalaman mengajar di BUFS, dia mendapatkan pemahaman bahwa negeri ini adalah negeri yang sangat menghargai senioritas terutama di kalangan mahasiswa. Junior harus hormat dan patuh pada senior. Dia mengungkapkan, "senior memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang besar dalam membina adik kelas mereka. Senior berkewajiban untuk melindungi, mengarahkan dan membimbing adik kelas mereka dalam setiap kegiatan akademis di universitas dan juga berhak untuk menegur mereka jika junior mereka melakukan kesalahan. Setiap Junior mematuhi ini sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis dan harus dihormati".

Kempat, dia melihat bahwa pada umumnya mahasiswa di Korea, terutama ditempatnya mengajar adalah mahasiswa pemalu. Mereka tidak se-aktif anak Indonesia jika ingin mengekspresikan pendapat ataupun ide yang mereka punya. "Untuk hal ini saya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan saya terhadap mahasiswa Indonesia" ujarnya.

Terakhir, adalah kebiasaan menjaga lingkungan dan kebiasaan jalan kaki yang menjadi budaya masyarakat korea, terutama di daerah Busan. Kota ini sangat teduh dan rapih dengan tata kelola lingkungan yang baik. Sampah menjadi perhatian utama. Di daerah ini sampah

dipilah hingga 12 item. Mulai dari yang basah, kering, plastik, kertas bahkan hingga botol minumanpun dipisah dengan baik dan rapih.

Bersih dari sampah dan selalu tertata asri menjadikan kota ini sebagai sebuah kota yang memanjakan para pejalan kaki. Hal ini mendukung kebiasaan masyarakat Busan yang sangat suka berjalan kaki. "Walaupun bagi saya yang biasa hidup di daerah dataran pantai, wilayah Busan cukup sulit untuk para pejalan kaki karena wilayahnya didominasi oleh perbukitan. Bahkan, universitas tempat saya mengajar, seperti banyak universitas lainnya di Busan, terletak di wilayah perbukitan," ujar Yenny.

Tidak ada bus kampus yang mengantar mahasiswa ke tiap gedung fakultas. Mahasiswa hanya diantar pada satu halte tertentu dan diharuskan berjalan kaki untuk mencapai fakultas masing-masing. Belum pernah terdengar ada mahasiswa yang mengeluh bahkan kebanyakan mahasiswa senang melakukan rutinitas tersebut. "Secara keseluruhan saya mendapatkan banyak pelajaran berharga dengan tugas ini. Rasa cinta tanah air menjadi semakin kuat dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Indonesia semakin terasah dengan melihat kecintaan masyarakat Korea Selatan pada negerinya" katanya.

DR APRIL H WARDHANA DAN KERJASAMA PENELITIAN DENGAN UNIVERSITY OF QUEENSLAND

Oleh: Nelti

Kiprah alumni IFP Ford Foundation dalam dunia pengetahuan memang tidak berhenti ketika mereka selesai sekolah. Setidaknya, hal ini dapat dilihat dari alumni IFP cohort IV (2004) – April H Wardhana.

Sepulang menyelesaikan S3 di London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), University of London, aktivitasnya tidak terhenti karena lingkungan dunia penelitian Indonesia yang kurang ideal dengan segala keterbatasannya, bahkan kondisi ini dianggap sebagai tantangan untuk terus mengembangkan ide-ide kreatifnya. Berbekal network yang telah dibangun selama pendidikan dan relasi yang terjalin baik, Dr. Wardhana berhasil membangun kerjasama penelitian dengan berbagai institusi di luar negeri, yang terbaru adalah kerjasama penelitian dengan peneliti dari Ecoscience-University of Queensland, Brisbane-Australia.

Bulan Juni kemarin Dr Wardhana terbang ke Australia untuk melakukan technical meeting guna membahas hal-hal terkait kegiatan penelitian yang akan dijalani bulan Juli serta melakukan beberapa laboratory testing. Selama kunjungan, dia mempresentasikan hasil-hasil penelitian Departemen Parasitologi yang dipimpinnya didepan para peneliti Ecoscience-Univ. of Queensland dan mendapat apresiasi yang hangat. “Pertemuan di Brisbane kemarin sangat bermanfaat, dimana saya mendapat kesempatan bertemu dengan Dr. Philip Spradbery, yaitu seorang ahli serangga dunia yang literaturnya banyak saya kutip saat penulisan thesis”, ungkap Dr. Wardhana.

“Dalam diskusi dan kerja bareng di lab. kemarin, saya juga mendapat pengetahuan gratis yang sangat berguna. Sungguh kerjasama mutualisme yang menyenangkan”, imbuhnya.

Penelitian kerjasama yang sedang dilakukan Dr Wardhana adalah pengujian terhadap beberapa insektisida untuk pencegahan dan pengobatan penyakit pada ternak yang disebabkan oleh serangga baik secara in vitro maupun in vivo. Menurut Dr Wardhana, penelitian ini sangat berguna bagi bangsa Indonesia terutama terkait dengan program pemerintah tentang swasembada daging 2014. Melalui peningkatan kesehatan ternak diharapkan populasinya akan terus bertambah



Bersama Dr. Philip Spradbery (Keterangan gambar kiri-kanan: Dr. April Wardhana, Dr. Philip Spradbery, Dr. Peter Green)

Foto: April

sehingga produksi daging juga semakin meningkat. Tentu saja, hal ini harus ditopang dengan program-program serta teknologi yang lain.

Peningkatan kesehatan ternak merupakan salah satu kegiatan yang memang tidak dapat dipisahkan dalam program pencapaian swasembada daging. Dr Wardhana memberi contoh kasus KLB penyakit trypanosomiasis yang terjadi di Sumba Timur bulan Mei 2012 kemarin. Penyakit ini telah menyebabkan ratusan kematian ternak dalam

waktu relatif singkat akibat lemahnya pengendalian serangga alat penghisap darah yang bertindak sebagai vektor penyakit tersebut. Bahkan laporan terakhir menyebutkan, penyakit ini telah menyerang lebih dari enam kecamatan padat populasi ternaknya. Ironisnya, dana penelitian di Indonesia sangat terbatas, apalagi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Oleh karena itu, sebagai peneliti, kita dituntut untuk lebih kreatif dan terus mengembangkan

komunikasi serta diskusi dengan peneliti-peneliti asing sehingga kerjasama-kerjasama yang bersifat mutualisme dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah di Indonesia tanpa harus kita “menjual” kekayaan hayati Indonesia. “Apalagi dampak perubahan iklim yang mengakibatkan pola dinamika serangga cepat berubah, Indonesia harus benar-benar siap akan hal ini,” tutur Dr Wardhana.

Yusdiana Menjadi Pemantau Internasional di Pemilu Kamboja



Foto: Yusdiana

Dari kanan ke kiri
Partner
AGENDA di
Kamboja Mr.
Hang Puthea
(NICFEC)
USAID
Reps: Diman
Simanjutak
(Cohort 1 Ford
Fellow)
Partner
AGENDA
di Kamboja:
Mr. Huy Khy
(CDPO)
AGENDA
Disability
Rights Advisor:
Yusdiana
(Cohort 6 Ford
Fellow)

Bulan Juni yang lalu tepatnya tanggal 3 Juni 2012, Yusdiana, alumni IFP Cohort 6 dari Lombok, mendapatkan kesempatan sebagai pemantau internasional dalam kegiatan pemilu di Negara Kamboja. Pemilu ini dikenal sebagai 'Sangkats'

Election. Ada 1,633 communes yang diperebutkan dalam Pemilu kali ini. Rakyat memilih wakil daerah mereka untuk menjadi anggota *community council*.

Yusdiana tergabung dalam kelompok pemantau yang berada dalam AGENDA

(General Election Network for Disability Access) yaitu jaringan yang terdiri dari organisasi penyandang disabilitas dan organisasi lembaga masyarakat di tingkat ASEAN yang aktif mempromosikan dan mengadvokasi hak partisipasi politik penyandang disabilitas,

khususnya dalam hal akses ke Pemilu. Jaringan ini mulai berdiri sejak tahun 2011. Saat ini telah tergabung tujuh Negara ASEAN yaitu Indonesia sebagai sekretariat jaringan, Malaysia, Kamboja, Philipina, Thailand, Laos dan Vietnam sebagai anggota dari jaringan.

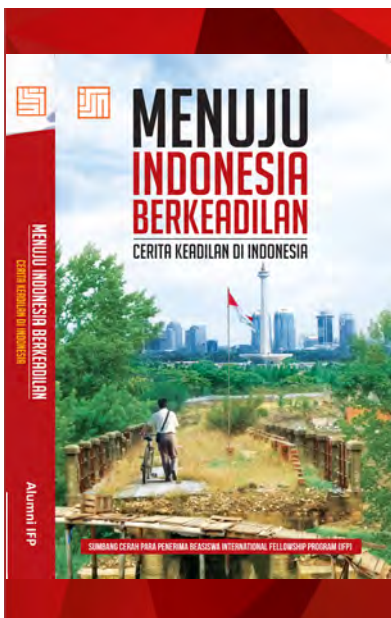
Pengamatan di Kamboja adalah pengalaman yang pertama di luar negeri setelah sebelumnya serangkaian hal serupa di beberapa Pemilukada di lima provinsi di Indonesia. Pengamatan dilakukan dengan melibatkan para penyandang disabilitas langsung sebagai pemantau berpasangan dengan pemantau bukan penyandang disabilitas yang sebelumnya telah sering melakukan pengamatan Pemilu. Hal ini dilakukan agar ada kerjasama dan pertukaran pengalaman dalam hal kepemiluan serta

berbagi pengetahuan mengenai isu-isu disabilitas. Hal yang dipantau adalah bagaimana akses yang tersedia di TPS sehingga memudahkan penyandang disabilitas memilih. Akses tersebut antara lain ketersediaan alat bantu pilih (*braille template*) bagi tuna netra, petugas yang ramah dan mengerti bagaimana membantu tuna rungu, dan lokasi TPS yang ramah bagi pengguna kursi roda misalnya terletak di tempat yang rata, tidak berbatu dan tidak bertangga.

Hasil pengamatan menunjukkan masih adanya berbagai kendala yang mengakibatkan penyandang disabilitas tidak dapat menikmati hak mereka untuk memilih. Dimulai dari tidak tersedianya undang-undang yang mengatur hak penyandang disabilitas dalam Pemilu,

minimnya pengetahuan para penyelenggara Pemilu mengenai bagaimana melaksanakan Pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas sampai tidak tersedianya alat bantu yang diperlukan sehingga penyandang disabilitas saat hari pemberian suara.

Dari pemantauan yang dilakukan, AGENDA kemudian membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum agar terjadi perubahan dalam pemberian akses bagi penyandang disabilitas. AGENDA ke depannya juga akan membuat modul pelatihan bagi para penyelenggara Pemilu agar mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas.



Segera terbit!

“Menuju Indonesia Berkeadilan”
Cerita Keadilan di Indonesia

From IFP to Fulbright:

Mission Impossible, but finally Accomplished within Three Years

Studying in American higher education with a three-year scholarship from Fulbright seems to be impossible. Before leaving for my host university, Florida State University, I was told that studying at a public research university was not going to be easy. Several common challenges would be faced by international students like me, coming from a different educational system. Among the challenges are language, money, classroom behaviors, the nature of relationships with professors and advisers, teaching styles, academic workload, expectations, class dynamics, and study requirements.

However, as an IFP Fellow and Fulbrighter, I felt that it was my challenge to

prove that finishing a PhD within three years is also POSSIBLE. After waiting for my visa for about eight months, I finally arrived at Florida State University as a Fulbrighter and started my program in Spring, January 2009. During my doctoral program, at Department of Educational Leadership and Policy Studies, College of Education, Florida State University, I experienced several interesting and impressive opportunities. The first week of semester, I met my temporary academic adviser (who finally became my professor directing dissertation); I told him that my Fulbright scholarship was three years to finish my PhD. He understood my situation and he even told me that he was willing to find other

sources of funding in case I could not finish my study within three years. We then designed my study program to finish my PhD within three years. He was a remarkable professor. One thing that I never forgot from him is “You are a Fulbrighter, Amir and I believe you can make it.” He set what I had to do every semester and I reported to him at the end of every semester as well. Anytime, I had difficulties, he and other professors at my department were willing to help me. As a result, I finished taking all required courses within 1,5 years, I passed the diagnostic doctoral exam, preliminary doctoral exam, and doctoral dissertation proposal, and defended my dissertation on 6th December 2011 with a GPA of 3.96. The message

space
available

Bila iklan Anda ingin ditampilkan dalam Social Justice Magz edisi mendatang silakan hubungi bagian marketing kami. call us: (021) - 8006458 (Eka/Shiroj)

behind my story is that we can make something impossible become possible by sharing with other people our situation.

Also during my Fulbright time, I did not only study, but I also actively participated in several activities. I received a lot of gold opportunities, I was appointed as a research assistant in Spring 2010 and from Fall 2010 to Fall 2011, I was appointed as a member of Departmental Advisory Committee at Department of Educational Leadership and Policy Studies, College of Education. The committee consists of the department chair, coordinator programs (professors), office manager, and one student

representative (me). Involving in this committee allows me not only to participate in monthly meetings with other members, but also allows me to connect with the whole members of department. As a result, I was chosen as a coordinator for the fall 2011 orientation for new graduate students at Department of Educational Leadership and Policy Studies, College of Education, Florida State University. I was also chosen as a co-leader for fall 2011 orientation at Graduate school at University level. In addition, I was invited by the Florida Department of Education to share my experience with other students in Florida. The dissertation was also

financially supported by the American-Indonesian Cultural & Educational Foundation, Inc. (AICEF).

Mission impossible, but finally completed within three years. I completed a PhD at a top public research university within three years. Thanks, Fulbright, without generous support from Fulbright, I may not have had enough courage to continue my study in the U.S. and thanks, the International Fellowship Program that has opened the first door for me to study a master's program abroad. Without the IFP program, studying abroad may be only a dream for good.



Amirul Mukminin

A faculty member at Faculty of Education, Jambi University, Indonesia. He holds a BA from Jambi University, MSc in educational sciences from Groningen University, the Netherlands, and PhD from Florida State University, the United States in Educational Leadership and Policy Studies and. He received an IFP Fellowship from the Ford Foundation to support his Master's program, and Fulbright scholarship to pursue his PhD and is currently an Erasmus Mundus postdoctoral researcher at Teacher Education Institute, University of Groningen, the Netherlands, funded by the European Commission.

WNI Tak Beridentitas Tak Miliki Hak Pilih

Oleh: Partono Samino



Akhirnya, revisi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah disahkan oleh paripurna DPR pertengahan April lalu telah resmi diundangkan menjadi UU No 8 Tahun 2012. Setidaknya kelompok masyarakat seperti penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemerhati pemilu memiliki kepentingan yang tinggi terhadap undang-undang tersebut telah menunggu undang-undang ini. satu kepentingannya adalah bagaimana undang-undang ini mengatur pemilu 2014.

Di luar substansi dari UU No 8 Tahun 2012, masyarakat sepatutnya memberikan

apresiasi kepada DPR dan Pemerintah yang telah berusaha dengan keras untuk merampungkan undang-undang pemilu ini jauh hari sebelum tahapan pemilu 2014 dimulai.

Berbeda dengan UU No 10 Tahun 2008 yang diundangkan beberapa hari menjelang tahapan pemilu dimulai, RUU Pemilu pengganti UU No 10 Tahun 2008 disetujui oleh DPR menjadi undang-undang dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun sebelum pemungutan suara diselenggarakan. Bagi banyak pihak, 2 tahun merupakan waktu yang memadai bagi KPU untuk mempersiapkan Pemilu 2014 dengan lebih baik.

Pemilih Tak Beridentitas

Namun demikian, UU No 8 Tahun 2012 masih menyisakan sejumlah masalah khususnya terkait dengan pengaturan penyusunan daftar pemilih. Mengapa daftar pemilih sangat penting dalam pemilu? Masyarakat tentu ingat bagaimana DPT menjadi "kisruh nasional" dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.

Harus diakui bahwa

undang-undang ini memiliki semangat tinggi untuk memberi jaminan kepada seluruh WNI yang telah memiliki hak pilih untuk didaftar ke dalam DPT dan memberikan hak pilihnya. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 40 ayat (5) yang memberikan jaminan bagi pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih (DP) Khusus. Pengaturan ini diharapkan menjawab permasalahan DPT 2009 di mana puluhan bahkan ratusan ribu pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dapat menggunakan hak konstitusinya.

Sayang, semangat untuk mengakomodasi Pemilih Khusus tersebut harus sirna karena dibatalkan oleh pasal lainnya. Pasal tersebut adalah Pasal 149 ayat (1) yang mengatur kategori pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS. Dalam pasal tersebut disebutkan 3 kategori pemilih yang memiliki hak pilih, yaitu (1) pemilih yang terdaftar di DPT di TPS yang bersangkutan, (2) pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih

(DP) Tambahan, dan (3) pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DP Tambahan.

DP Tambahan adalah daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat atau TPS lain atau lebih dikenal sebagai pemilih pindah. Sedangkan kategori ketiga merujuk pada pemilih yang memiliki identitas kependudukan namun tidak terdaftar di DPT maupun DP Tambahan. Kategori ketiga ini dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara mendatangi TPS di mana pemilih berdomisili sesuai alamat di KTP/Passport atau identitas lainnya dengan menunjukkan bukti identitas tersebut kepada petugas. Pemilih kategori kedua dan ketiga diberikan hak pilih setelah seluruh pemilih kategori pertama yang hadir di TPS selesai menggunakan hak pilihnya. Pemilih kategori ketiga ini untuk mengakomodir Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 yang membolehkan penggunaan KTP/KK/Passport dalam Pilpres 2009.

Lantas bagaimana dengan DP Khusus yang terdiri dari pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan? Mengapa dalam tahapan pendaftaran pemilih mereka didaftar, namun ketika tahapan pemungutan suara mereka tidak diberi hak memilih? Apakah sebuah kesengajaan atau ketidaktelitian DPR dalam merumuskan pasal demi pasal dalam undang-undang?

Apapun alasannya, WNI yang telah memiliki hak pilih, meski tidak memiliki identitas kependudukan, potensial dirugikan hak konstitusinya karena tidak diberi hak memilih. Penelitian yang pernah penulis lakukan menunjukkan bahwa puluhan ribu pemilih tidak memiliki identitas kependudukan bukan disebabkan pemilih tersebut tidak mau memiliki kartu identitas kependudukan, tapi banyak faktor yang menyebabkan pemilih tidak memiliki identitas kependudukan. Beberapa di antaranya adalah mereka tinggal di kawasan illegal sehingga keberadaan mereka tidak diakui oleh pemerintah setempat. Kasus ini terjadi di Mesuji dan Way Kanan Provinsi Lampung, di mana puluhan ribu pemilih tinggal di daerah Register Perhutani, atau di Tanah Merah, Jakarta. Selain karena tinggal di kawasan illegal, ribuan pemilih tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari kantor desa/kelurahan dan akses untuk mendapat pelayanan KTP sangat mahal dan jauh.

DPT Potensial Bermasalah

Undang-undang ini juga meninggalkan ketidakjelasan bagaimana DP Khusus disusun dan ditetapkan. Undang-undang hanya menyatakan bahwa DP Khusus disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi. Menurut penulis, KPU Provinsi tidak mampu untuk menjangkau pemilih tersebut secara

langsung. Undang-undang di sisi lain memberi tugas dan wewenang kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan pemutakhiran dan memverifikasi apakah WNI termasuk kategori pemilih atau tidak. Mengapa pemilih yang masuk kategori ini diberi istilah tersendiri? Akan lebih baik jika undang-undang mengatur bahwa Pantarlih memasukkan pemilih kategori ini ke dalam DPT dengan memberikan catatan bahwa pemilih tidak memiliki identitas kependudukan.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah sumber data pemilih. Sumber data daftar pemilih untuk Pemilu 2014 adalah data kependudukan dari pemerintah (Kemendagri dan Pemerintah daerah). Kemendagri dan Pemerintah Daerah akan memberikan data kependudukan kepada KPU secara berjenjang. Yang dimaksud berjenjang adalah Kemendagri menyerahkan data kependudukan kepada KPU, Gubernur kepada KPU Provinsi, dan Bupati/Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Data kependudukan terdiri dari 2 (dua) data yang berbeda, yaitu Data Agregat Kependudukan (DAK 2) yaitu data agregat/jumlah penduduk tiap kecamatan seluruh Indonesia, dan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4). DAK 2 akan digunakan KPU sebagai dasar dalam menyusun daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota. Sedangkan DP4 adalah data yang berisi data penduduk yang berpotensi untuk menjadi pemilih dalam Pemilu 2014 yang akan diverifikasi dan disusun dan ditetapkan menjadi DPT.

Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (4) dan (5) mengatur bahwa KPU bersama Kemendagri melakukan “sinkronisasi” DAK 2 dengan data penduduk luar negeri. Hasil sinkronisasi data selama 2 bulan tersebut kemudian menjadi DP4. Pengaturan sumber data tersebut yang menurut hemat penulis sangat sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin mengolah DAK 2 yang sifatnya numeric menjadi DP4 yang sifatnya alphabetical. DAK 2 hanya berisi data jumlah penduduk, sedangkan DP4 berisi data-data identitas pemilih.

Kalaupun yang dimaksud sinkronisasi adalah melakukan perbandingan data jumlah penduduk tiap kecamatan yang diberikan oleh Kemendagri dengan data jumlah penduduk yang dimiliki oleh KPU, pertanyaan berikutnya adalah apakah KPU memiliki data jumlah penduduk sebagai pembanding, karena wewenang KPU adalah mengurus pemilih.

Akan lebih rasional apabila yang dibandingkan adalah DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU. Hasil sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir inilah yang menurut hemat penulis menjadi data awal untuk dimutakhirkan oleh Pantarlih. Jika demikian, maka penyerahan DP4 dari pemerintah kepada KPU diserahkan bersamaan dengan DAK 2.

Penyerahan data kependudukan yang dilakukan secara berjenjang akan menyulitkan KPU dalam melakukan kontrol terhadap kualitas DPT yang disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. KPU sulit memastikan bahwa data kependudukan yang akan diterima di pusat akan sama dengan data kependudukan yang diterima oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Jika berbeda, data mana yang dinilai valid dan bagaimana proses penyelesaiannya?

Hemat penulis penyerahan data kependudukan dilakukan secara terpusat, yaitu antara Kemendagri dengan KPU. Data dari Kemendagri tersebut diharapkan data yang paling mutakhir dari program E-KTP.

Gubernur dan Bupati/Walikota tidak perlu menyerahkan data kependudukan kepada KPUD. Dengan demikian KPU bisa melakukan kontrol terhadap sumber data yang akan dimutakhirkan.

Apa yang harus dilakukan

Pertama, berkaitan dengan potensi hilangnya hak konstitusi pemilih yang termasuk dalam kategori DP Khusus, maka cara yang tepat adalah DPR segera merevisi pasal-pasal terkait sesegara mungkin. Keterlambatan merevisi hampir dapat dipastikan akan menuai gugatan uji materi terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Kedua, untuk menghindari terjadinya multi-tafsir Pemerintah, DPR dan KPU segera duduk bersama untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan daftar pemilih tersebut di atas dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Hal ini sebagai bangunan komitmen bahwa sukses penyelenggaraan pemilu harus didukung semua pihak.

Bila iklan Anda ingin ditampilkan dalam Social Justice Magz edisi mendatang silakan hubungi bagian marketing kami. call us: (021) - 8006458 (Eka/Shiroj)

space
available

Cit-J, Memindahkan Warung Kopi ke Online

Oleh: Wilson Lalengke

Salah satu sifat dasar manusia Indonesia umumnya adalah berbagi cerita antar warga. Di setiap kerumunan remaja, gadis belia, sopir dan tukang becak, arisan ibu-ibu PKK, bahkan di lobi-lobi kantor parlemen selalu riuh dengan seliweran cerita dan berita yang disampaikan ala “gosip” antar anggota kumpulan. Beragam topik diperbincangkan, dari yang ringan-renyah sampai ke masalah rumit yang menyerempet persoalan ekonomi, sosial hingga ke politik. “Obrolan Warung Kopi” adalah istilah yang telah menjadi trade mark di masyarakat kita tentang proses berbagi cerita, berita, informasi, juga gagasan serta idealisme antar warga masyarakat.

Di tataran formal, pertukaran informasi terjadi begitu intens di berbagai kalangan pendidikan, antar siswa, mahasiswa, guru dan dosen; berlangsung di seminar-seminar, mimbar umum, dan di ruang-ruang publik yang lebih “terencana dan terkendali” seperti di acara talk-show, dialog interaktif, workshop, dan lain-lain. “Obrolan produktif” seperti ini juga berlangsung setiap hari di kantor-kantor pemerintah, swasta, rapat atau pertemuan resmi lainnya.

Suatu hal yang dapat

dipastikan bahwa setiap penyampaian dan pertukaran informasi selalu diikuti oleh konsekuensi logis atas pertukaran tersebut, yakni terbaginya (baca: tersebarnya) sebuah informasi dari satu orang kepada yang lainnya. Ketika sebuah informasi, betapapun sederhananya substansi dan cara penyampaiannya, tersebar dari satu orang ke pihak lainnya, hal tersebut senantiasa akan memberi dampak pada pola pikir dan perilaku setiap penerima informasi yang tersebar itu. Besaran akibat yang ditimbulkan oleh proses penyebaran informasi akan berbeda tingkatannya antara satu orang dengan lainnya, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Perbedaan itu juga akan terlihat dari besar kecilnya jumlah orang yang terlibat dan lama atau singkatnya sebuah “dampak informasi”.

Sesungguhnya, semua informasi dan proses publikasi media massa secara fisik tidak bermakna apa-apa. Juga tidak akan menimbulkan dampak apapun terhadap apapun dan siapapun. Kertas koran, televisi, radio dan media apapun juga tidak punya kuasa apa-apa, walau hanya sekedar memindahkan dirinya sendiri, walaupun isinya adalah informasi tentang



penemuan lokasi surga oleh seorang penerbang angkasa luar. Betapa sangat lumrah kita temui kertas koran hanya jadi pembungkus kacang dan cabai di pasar-pasar tradisional di seantero negeri.

Persoalan muncul ketika sebuah informasi, yang disampaikan ke masyarakat memiliki daya potensial yang amat besar untuk direspon publik. Artinya, sebuah informasi di koran misalnya, tidak berarti apa-apa jika tidak mendapatkan umpan balik dari pembacanya. Oleh karena itu, semua persoalan publikasi informasi di media massa hakekatnya ada pada pihak publik, di sisi masyarakat umum, bukan pada informasi dan/atau media massa dengan segala perangkatnya. Dalam bahasa sederhana, masalah yang muncul sebagai akibat publikasi informasi sebenarnya terletak pada bentuk respon

atau reaksi masyarakat dan cara mengekspresikan respon masyarakat terhadap informasi yang diterimanya.

“Reaksi publik” atas setiap informasi yang disajikan media massa adalah kata kunci yang harus menjadi landasan berpijak dalam membedah dan mengatasi persoalan publikasi dan media massa. Berkaitan dengan itu, usaha pencerdasan masyarakat umum terhadap media adalah hal paling aktual dan tidak dapat ditawar-tawar. Hanya dengan menyediakan program pemberdayaan rakyat yang langsung melibatkan setiap individu rakyat, akan memungkinkan mereka “mengunyah” setiap informasi, betapapun keras, liat, dan kuatnya nuansa “provokasi” yang terkandung dalam sebuah informasi. Ibarat makan, menumbuhkan “gigi geraham pengunyah informasi” adalah hal teramat mutlak, karena dengan demikian setiap anggota masyarakat akan mampu menelan informasi secara benar setelah melalui proses mengunyah dengan baik. Bila hal itu terjadi, respon yang muncul menyikapi isu yang diinformasikan tentunya akan lebih konstruktif, logis, dan positif.

Secara tekhis, hal termudah dilakukan adalah mengembangkan pola jurnalisme warga atau biasa disebut

citizen journalism (Cit-J), yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk menjadi jurnalis warga. Melalui strategi ini, setiap warga masyarakat langsung mengalami “kerja jurnalistik” sesungguhnya, dan selangkah demi selangkah mereka belajar bagaimana berbagi informasi yang benar, efektif, dan efisien, sekaligus memperluas wawasannya. Sehingga pada gilirannya akan mampu bereaksi dengan baik ketika disuguhkan sebuah informasi dari pihak lain. Melalui pola jurnalisme warga, proses tumbuh-kembangnya gigi geraham pengunyah informasi berlangsung secara alamiah, dinamis, nyaman, dan mencapai konstruksi dasarnya yang ideal dan kokoh tanpa intervensi berlebihan dari luar.

Era keberuntungan datang seiring kehadiran teknologi komputer dan internet kepada masyarakat luas. Melalui ketersediaan perangkat teknologi pendukung utama pengembangan media publikasi generasi modern, setiap orang mampu membangun dan mengembangkan media massa digital yang biasa kita kenal dengan istilah “media online”. Melalui teknologi baru ini, setiap orang tanpa kecuali dapat berperan, tidak hanya sebagai kontributor atau pembagi cerita, gagasan dan impian, namun sekaligus bisa menjadi pemimpin dan penentu tunggal

muatan dan tujuan media online yang dibangunnya, yang dapat diakses setiap saat di mana saja, tanpa batas ruang dan waktu.

Sifat bawaan masyarakat Indonesia sebagai “tukang ngobrol”, “biang gosip”, “mulut ember”, dan sebagainya dapat menjadi aset potensial bagi pengembangan publikasi ala warga biasa. Obrolan warung kopi para tukang becak maupun obrolan produktif hasil “ngegosip” orang kantoran dan mereka yang “makan sekolahan” dapat menjadi muatan publikasi yang inspiratif dan kaya nutrisi bagi pengembangan kebudayaan masyarakat negeri ini.

Tugas kita hanya memindahkan kebiasaan obrolan warung kopi menjadi kebiasaan menulis, memotret, dan melukiskan peristiwa, gagasan dan impian masing-masing individu dan komunitas dan membagikannya kepada pihak lain melalui publikasi di media massa, di media online. Sekali lagi, hanya memindahkan obrolan warung kopi menjadi obrolan warung online. Budaya obrolan warung online ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan jurnalistik setiap anggota masyarakat, tapi juga sebagai jalan tol yang ampuh dalam menumbuhkan gigi geraham yang kokoh untuk mengunyah sebaik-baiknya segala informasi yang disajikan oleh media massa.

Bila iklan Anda ingin ditampilkan dalam Social Justice Magz edisi mendatang silakan hubungi bagian marketing kami. call us: (021) - 8006458 (Eka/Shiroj)

space
available

Keadilan Perempuan dalam Pertanian

Sektor pertanian di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja perempuan, sebesar 55,2% dari total petani. Akan tetapi kondisi perempuan dalam sektor tersebut masih sering diabaikan dan sedikit mendapat dukungan dari pemerintah maupun sektor swasta. Hal ini dapat dilihat dari misalnya upah perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki dengan pekerjaan yang kurang lebih sama, atau minimnya akses perempuan terhadap sumber daya pertanian. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai agen perubahan? Terima kasih atas jawabannya

Marlini Tanti

Semarang, Jawa Tengah

Lilis Suryani menjawab:

Ada faktor struktural dan teknis yang mengakibatkan pekerjaan perempuan dalam sektor pertanian cenderung terabaikan. Faktor-faktor tersebut telah mengakar dalam struktur masyarakat kita baik dalam segi politik, hukum, budaya, dan agama. Sebagai contoh, struktur yang menempatkan lelaki sebagai kepala rumah tangga sedangkan perempuan adalah membantu kerja laki-laki. Khususnya dalam sektor pertanian, peran perempuan di lahan keluarga sering dianggap hanya sebagai “membantu” pekerjaan laki-laki.



Anggapan tersebut berdampak pada diabaikannya tenaga kerja petani perempuan. Lebih khususnya perempuan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumberdaya pertanian, baik yang berupa pelatihan, alat ataupun teknologi baik dari pemerintah ataupun sektor swasta.

Bila iklan Anda ingin ditampilkan dalam Social Justice Magz edisi mendatang silakan hubungi bagian marketing kami. call us: (021) - 8006458 (Eka/Shiroj)

space
available

Stereotype yang lain terkait dengan perbedaan nilai terhadap jenis pekerjaan yang sifatnya reproduktif (domestik) dan produktif. Sektor pertanian merupakan sektor produktif yang cenderung dikuasai oleh laki-laki. Peran perempuan dalam sektor domestik dianggap memiliki value yang lebih rendah, apalagi dalam konteks pasar bebas dimana "uang" merupakan penentu untuk menilai berharga tidaknya sebuah pekerjaan. Sehingga pekerjaan yang sifatnya produktif dianggap lebih penting/berharga dibanding yang domestik.

Persoalan lain terkait dengan faktor hukum atau agama khususnya mengenai hak kepemilikan lahan yang pada umumnya dimiliki atas nama laki-laki. Lahan ataupun asset lainnya merupakan faktor yang sangat penting bagi petani khususnya untuk mendapatkan akses terhadap modal. System perbankan kita yang mengharuskan adanya jaminan asset (yang kebanyakan dimiliki laki-laki) mengakibatkan sulitnya perempuan untuk meminjam ke bank karena ketidakadaan asset yang dimiliki, kecuali atas ijin suami/keluarga.

Dalam sektor politik, rendahnya partisipasi dan kepemimpinan perempuan diranah public, misalnya dalam assosiasi atau kelompok petani, koperasi. Selama ini, layanan pertanian biasanya diberikan melalui farmer association, jadi apabila perempuan tidak aktif, megnakibaktn rendahnya akses

terhadap fasilitas tersebut. Dalam konteks ekonomi, pasar bebas membutuhkan produk yang berkualitas dan kompetitif dengan biaya yang serendah-rendahnya, kondisi ini mengharuskan petani harus menjadi punya pengetahuan dan keahlian yang tinggi untuk memenuhi pasar yang kompetitif tersebut. Sehingga, dalam struktur pasar bebas, perempuan cenderung ada pada rantai nilai yang paling rendah, yaitu pada level produksi sebagai tenaga kerja yang paling murah, atau bahkan tenaga kerja yang tidak dibayar.

Menjawab pertanyaan apa yang bisa kita lakukan sebagai agen perubahan, ada beberapa hal, dari hambatan tadi, kita dapat mengenali, ada dua strategi mendasar, dapat melalui top down, dan bottom up.

Top down, kita dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang berpihak pada perempuan, misalnya mempengaruhi pemerintah untuk selalu menyiapkan data terpilah ataupun regulasi lain yang berpihak pada petani perempuan. Data terpilah yang harus ada, yaitu misalnya peran, jumlah, analisa, mengenai keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian. Dari situ kita bisa menemukan intervensi yang plng tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami perempuan dalam pertanian. Intervensi perusahaan swasta juga merupakan salah satu cara untuk menjangkau lebih

banyak petani perempuan dalam extensive services, misal pengenalan pupuk dll.

Melalui bottom up dapat berupa pemberdayaan petani perempuan. Mulai dari literasi atau edukasi. Misalnya dengan membuka kesempatan dan partisipasi yang lebih luas untuk mengikuti berbagai pertemuan, misalnya dengan menyesuaikan jam-jam dan tempat kegiatan, perempuan akan dapat mengakses layanan-layanan pertanian.

Kemudian, hal yang bisa kita lakukan juga, adalah raising awarness. Raising awarness ini dapat dilakukan dengan banyak cara, misalnya memberi penghargaan, mengangkat profil petani perempuan dalam media-media, baik studi kasus, maupun gambar.

Sebagai seorang gender specialist, selama 12 tahun ini, pekerjaan Lilis Suryani fokus pada peningkatan kapasitas, kekerasan berbasis gender, metodologi penelitian berkenaan dengan feminisme dan permasalahan-permasalahan gender pada berbagai sektor kegiatan seperti pertanian, pemanfaatan sumberdaya alam, pengurangan resiko bencana, analisis kebijakan, dan lain-lain. Saat ini Lilis bekerja sebagai Ahli Gender Nasional di sebuah proyek bernama Agribusiness Market And Support Activity (AMARTA II) yang didanai USAID, berbasis di Jakarta.

Inna Lillahi Wa Inna Ilillahi Rojiun
Telah berpulang ke Rahmatullah



Ratna Dewi Mundingsari S.Pt, M.P, MBA

Alumni IFP cohort 4
Kamis, 26 Juli 2012

Segenap redaksi Majalah Social Justice Magz mengucapkan
Turut belasungkawa sedalam-dalamnya

Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT dan
diberikan tempat yang layak di sisi-Nya

Serta semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh
Allah SWT

Amin... Amin... ya Robbal Alamin....

Mrs. Esa

By
Rilda A.Oe. Taneko*

Gerbang-gerbang sekolah di perkampungan kumuh itu dilengkapi oleh metal detector. Hampir setiap hari suara tembakan terdengar. Dinding-dinding bangunan, toko-toko dan lorong bawah jembatan dipenuhi coretan graffiti tanpa cita rasa seni. Di satu sudut perkampungan itu, terdapat sebuah kompleks apartemen, yang juga terlihat kumuh.

Apartemen itu berbentuk kotak, bertingkat tiga belas, dan di tiap tingkatnya terdapat ratusan rumah. Cat dinding apartemen yang berwarna kecokelatan sudah banyak mengelupas. Jendela dan pintu kayu berlubang dimakani rayap atau lapuk oleh umur dan cuaca. Tiap lantai dibatasi pagar berbentuk jeruji, serupa dengan pegangan tangga, pagar-pagar itupun berupa besi-besi hitam tanpa cat. Satu-satunya lift yang ada sudah sangat tua, bising bergemuruh dan berderik ketika bekerja, berbau pesing pula.

Rumah-rumah yang ada di apartemen itu tidak besar. Bahkan orang-orang yang tak tinggal di sana menyebut rumah-rumah itu serupa kotak sepatu atau sangkar burung, semacam pigeon hole.

Mrs. Esa tinggal di lantai tujuh apartemen itu. Ia menghuni rumah nomor tujuh ratus dua puluh empat yang terletak di blok C. Mrs. Esa seorang pekerja keras. Ia memiliki tiga orang anak remaja yang harus dihidupinya. Suaminya telah lama pergi meninggalkannya. Siang dan malam Mrs. Esa berjaga menunggu panggilan tugas. Tak jarang ia harus menginap.

Seperti siang itu, di satu sudut apartemen, Mrs. Esa berdiri menunggu lift. Tas berisi perlengkapan menginapnya ia letakkan di dekat kaki. Tak lama, Mrs. Esa mendengar gemuruh lift bergerak dari lantai bawah menuju lantai ia menunggu. Ia bersiap menjinjing tasnya. Seorang remaja keluar dari lift. Mrs. Esa tidak dapat melihat wajahnya. Remaja itu berjalan cepat melewatinya, tubuhnya membungkuk dan wajahnya bersembunyi dibalik hoody, tutup

kepala dari baju yang dipakainya.

Mrs. Esa menggeleng-gelengkan kepala. Tak punya sopan santun, pikirnya. Tak ada sapaan halo ataupun goodbye. Mrs. Esa melirik jam di tangannya. Ini masih jam sekolah dan remaja itu masih usia sekolah. Entah apa yang dilakukannya di luar sekolah hari ini. Mrs. Esa mendengus, remaja tak berguna, tua nanti hanya akan bergantung pada tunjangan negara. Ya, hanya akan hidup dari pajak yang dibayar orang-orang sepertinya, yang selalu bekerja keras.

Keluar dari lift, Mrs. Esa berpapasan dengan dua orang tua, mereka saling melempar senyum. "Ni hao?" sapa satu orang tua.

Entah keberapa kalinya Mrs. Esa mendapat sapaan demikian. Dan entah ke berapa kalinya, Mrs. Esa menjawab, "Aku bukan orang Cina. Aku dari Indonesia."

Wajah kosong adalah respon yang selalu Mrs. Esa dapat dari penyapanya. Mungkin mereka tidak pernah mendengar Indonesia, pikir Mrs. Esa. Mungkin bagi mereka, semua orang Asia Tenggara terlihat sama, serupa dengan bangsa Cina.

Mrs. Esa pun berlalu dengan menggeleng-geleng kepala.

Seberlalunya Mrs. Esa, dua orang tua itu berbisik-bisik. George menyenggol pundak Calum, "Perempuan penghibur." Sambil berbisik begitu matanya melirik ke arah Mrs. Esa.

"Apa kamu yakin?" tanya Calum.

"Ya, ia sering tak pulang malam, pagi-pagi baru datang. Tak punya suami pula."

"Nah," geleng Calum, "dia terlihat seperti orang baik. Iapun sudah berumur, tambun dan berwajah biasa-biasa pula."

"Kamu tidak akan pernah tahu dengan imigran-imigran ini. Jika mereka dapat kerja bersih-bersih, mereka tentu akan lakukan itu. Tapi jika tidak?"

"Setidaknya mereka bekerja, tidak seperti kau," Calum tertawa.

"Aku bekerja? Nah. Untuk apa? Untuk

menghidupi imigran-imigran itu?”

George mendengus. “Sementara mereka hanya bermalas-malasan dan menghabiskan uang pajak.”

“Nah,” kata Calum, “kemarin kau mengeluh mereka mencuri pekerjaan kita, sekarang kau bilang mereka hanya bermalas-malasan.”

“Memang mereka itu selalu begitu,” bantah George, “jika tidak mencuri pekerjaan kita, maka imigran-imigran itu akan mencuri uang pajak kita.”

Tiba-tiba Calum, dengan melirik dan memajukan sedikit bibirnya, mengisyaratkan George untuk diam. Seorang remaja berkulit hitam berjalan ke arah mereka. Wajahnya ditutupi hoody. Ia berjalan santai melewati Calum dan George. Namun, sekejap kemudian dia membalik badan.

“Orang tua sialan!” teriaknya, sambil mengacungkan jari tengah.

Melewati George dan Calum, sambil menggeleng-gelengkan kepala, Mrs. Esa kembali mendengus. Orang-orang tua pemalas, pikirnya. Dari muda sampai tua hanya menengadahkan tangan pada pemerintah. Seumur hidup tinggal di apartemen yang dikasih pemerintah dengan cuma-cuma. Tak pernah sekalipun mereka bekerja. Banyak sekali alasan mereka untuk tidak bekerja. Entah sakit, entah stress, entah lupa ingatan. Padahal sehari-hari hanya menggossip. Menghabiskan uang pajak untuk minum-minum.

Suatu hari aku akan pindah dari tempat ini, pikir Mrs. Esa. Suatu hari aku akan pulang ke Indonesia. Suatu hari akan aku keluarkan anak-anakku dari tempat terkutuk ini. Sebelum mereka hilang jati diri, hilang identitas, hilang akar dan menjadi berandalan seperti remaja-remaja di tempat ini. Ya, suatu hari aku akan kembali.

Mrs. Esa menuju lapangan di tengah gedung apartemen. Sebuah lapangan semen, tanpa pepohonan, yang digunakan untuk parkir mobil dan tempat pembuangan sampah. Sampah-sampah itu sendiri kerap meluap dari bin sampah, plastik-plastik hitam menggantung dan ketika musim panas tiba, lalat-lalat terlihat ramai berterbangan.

Di sudut-sudut lapangan, pelakat-pelakat

larangan jelas terbaca: ‘Dilarang bermain bola’, ‘Dilarang membuang sampah sembarangan’, ‘Dilarang mencoret-coret dinding’, dan peringatan: ‘Kamera CCTV beroperasi 24 jam.’

Mrs. Esa membuka pintu sebuah Nissan Micra tua berwarna perak. Ia duduk di belakang kemudi dan meletakkan tasnya di kursi sebelah. Sekali dua kali Mrs. Esa memutar kunci, mobil tidak juga menyala. Ah, pasti accu-nya kembali bermasalah, pikir Mrs. Esa. Ia melirik jam di tangannya. Tak ingin terlambat, ia kembali memutar kunci mobilnya berkali-kali. Menit berlalu sudah, Mrs. Esa menyerah. Lebih baik mengejar tube, pikirnya.

Ia mengunci mobilnya dan beranjak ke gerbang kompleks apartemen. Sayup di belakangnya, ia mendengar seseorang memaki. ‘Orang tua sialan!’

Mrs. Esa menoleh ke belakang. Anak remaja itu lagi, dengusnya. Apa lagi masalahnya kali ini? Anak-anak ini tidak bisa menjaga ucapan, semudah bernafas mereka memaki orang.

Remaja itu hampir melewatinya ketika kemudian ia berhenti. “Orang tua sialan,” katanya, memberitahu Mrs. Esa.

Mrs. Esa menggeleng-gelengkan kepala.

“Mereka pikir kita senang sekali tinggal di negara ini. Imigran ini imigran itu. Sejuta imigran di negeri ini dan mereka sudah gerah. Lupa masa lalu. Sementara puluhan-puluh juta mereka menduduki dunia. Merampok Amerika, Asia, Canada, Australia, Afrika. Mereka yang membawa kami kemari dan menjadikan kami budak. Dan sekarang mereka bilang, imigran begini, imigran begitu.”

Si remaja membuang ludah ke semen lapangan.

Mrs. Esa mengurut dada dan terus-menerus menggelengkan kepala.

Remaja itu berlalu dari hadapannya, terus berjalan menuju kota. Mrs. Esa masih dapat mendengar sumpah serapahnya. Ia menghela nafas. Dilirikinya jam di tangan. Hampir terlambat. Orang yang harus ditunggunya kali ini tak mampu berjalan ataupun menggerakkan tangan. Ia tahu ia harus bergegas, ia tak ingin terlambat dan membiarkan pasiennya sendirian.

Mrs. Esa mempercepat langkah. Namun sebuah suara tembakan mengejutkannya. Mrs. Esa berhenti melangkah.

“Siapa lagi yang mati siang ini?” pikirnya.

Lalu sirine meraung dari jalanan. Mobil-mobil menepi, membiarkan beberapa mobil polisi berlalu cepat.

Mrs. Esa membalikkan badan, menjauhi asal suara tembakan dan raung sirine. Dengan bergegas ia menuju underground terdekat.

Minggu berselang sejak hari itu. Di kompleks apartemen kumuh, di satu rumah yang serupa sangkar burung, Mrs. Esa berdiri terpaku memandang televisi. Kemudian, seperti tersadar ia berlari ke jendela. Ia dapat melihat asap hitam membumbung tinggi, memenuhi langit di luar sana.

Mrs. Esa berlari keluar rumah, berpegangan pada pagar besi hitam, ia melihat ke lapangan bawah. Puluhan remaja berkumpul pada sudut-sudut lapangan semen dan serentak mereka berjalan keluar gerbang apartemen. Mrs. Esa tidak dapat melihat wajah mereka, semua menutupkan hood pada kepala mereka.

Mrs. Esa dapat melihat George dan Calum di apartemen seberang. Merekapun sedang memandang ke arah kelompok remaja itu juga. Lalu Mrs. Essa melihat mereka bergegas kembali ke rumahnya masing-masing, menutup pintu dan juga tirai jendela.

Mrs. Esa berlari kembali ke rumahnya, mencoba menghubungi telepon genggam ke tiga anaknya. Tak ada satupun yang mengangkat.

Mrs. Esa merasai panik dan degup jantungnya yang menguat. “Mereka ada di sekolah,” hiburannya pada diri sendiri. “Mereka masih di sekolah dan akan kembali sebentar lagi.”

Namun senja mulai memerahi langit. Asap

hitam di luar sana terlihat semakin tebal dan bergulung-gulung menghitamkan langit kota. Anak-anaknya belum juga pulang. Mrs. Esa mulai merasai matanya memanas. Ia merasa gagal.

Mrs. Esa berdiri memandangi api yang membara di televisi. Rumah-rumah dibakar, toko-toko dijarah. Polisi dicaci-maki dan dilempari dengan bata. Penembakan seorang remaja kulit hitam oleh polisi, sepekan silam, adalah pemicu kerusuhan, demikian penyiar televisi memberitakan.

“Mengapa hal seperti ini bisa terjadi?” tanya seorang pemain bola.

“Apa yang terjadi pada negeri ini?” tanya penyiar televisi.

“Apa masyarakat kita sakit?” tanya walikota London.

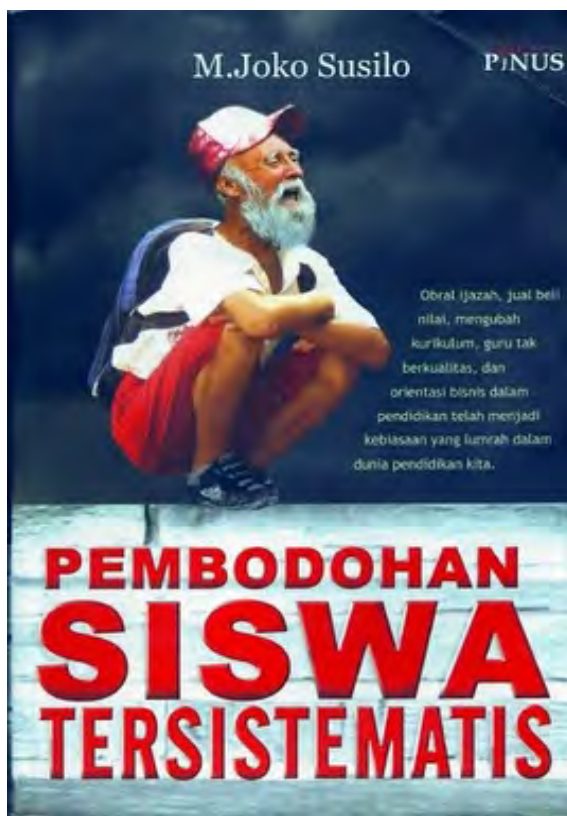
“Negeri yang lemah lembut begini?” geleng seorang selebriti.

Mrs. Esa berlari menjauhi televisi. Ia terus berlari, meninggalkan pintu rumah yang terbuka. Sepanjang jalan tak henti ia meneriaki nama ketiga anaknya. Ia telah gagal. Setelah ini, ia tak tahu apakah ia akan mampu kembali ke Indonesia.

Mrs. Esa terus berlari, menuju senja yang merah. Membara.

Lancaster, September 2011

Rilda Aprisanti Oelangan Taneko lahir di Tanjung Karang, tahun 1980. Ia menyelesaikan S1 Sosiologi (Cum Laude) dari Universitas Lampung (Unila) dan S2 Bidang Jender dan Pembangunan di Institute of Social Studies, Den Haag. Sejak 2005, Rilda hidup berpindah-pindah. Kota Maastricht, Den Haag (Belanda), Semenyih (Malaysia), Newcastle upon Tyne dan Lancaster (Inggris) adalah kota-kota yang pernah ditinggalinya. Tulisan-tulisan ilmiah dan cerpen-cerpennya tersebar di berbagai media, antara lain Jurnal Perempuan, KPEL-Bappenas Bulletin, Jurnal Sosiologi, Lampung Post dan Radio Netherlands. Cerpen Istri Pilihan yang dialihbahasakan menjadi *The Chosen Wife* ikut dalam pameran 100 Faces, 100 Stories, Newcastle upon Tyne, UK. Cerpen Sungai Tyne, Sebuah Labirin dan Pokok Cemara Tua terbit di antologi 30 Hari dalam Cinta-Nya (Dragon Publisher, Hongkong, 2010 dan di Taiwan, 2011). Kumpulan cerita pertamanya, *Kereta Pagi Menuju Den Haag*, diterbitkan oleh Penerbit Pensil-324, Jakarta, 2010.



Fatamorgana. Itu yang terbersit dibenak saya ketika melewati lembar demi lembar dari buku yang judulnya cukup radikal, *Pembodohan Siswa Tersistematis*. Gambar depannya pun terbilang super, mengingatkan saya pada kisah seorang kakek berusia 60-an tahun di Kenya yang duduk di bangku SD bersama cucu-cucu sekampungnya, dampak dari dicanangkannya *Education For All*. Setelah menyelesaikan beberapa bagian dari buku itu barulah tertangkap oleh 'radar' saya makna di balik gambar depan itu yaitu, seseorang yang sudah uzur tetapi pola pikir dan perilakunya tidak ubah dengan seorang bocah SD. Jelas menggambarkan sebuah sistim pembodohan. Buku ini membuat saya terhentak ke alam sadar dan melihat kenyataan betapa perkembangan pengelolaan pendidikan di Indonesia dewasa ini terlalu banyak menciptakan fatamorgana. Sesuatu yang nyata namun sebetulnya tiada. Peningkatan mutu dikejar dengan berbagai desain kebijakan yang kebanyakan semu. Yang benar "nyata dan ada" adalah pembodohan.

Penulis mengorganisasikan muatan

Fatamorgana Pendidikan di Indonesia

Resensi Buku

Judul: Pembodohan Siswa Tersistematis
Penulis: Muhammad Joko Susilo
Penerbit: Pinus Book Publisher
Tebal: 239 halaman
Peresensi: Lusi Peilouw*

bukunya dalam 8 bagian, tentu dengan alur pikir dan desain penulisan yang diyakini baik oleh penulis. Namun saya melihatnya dalam 4 bagian besar, karena 6 bagian awal semuanya merupakan realita pendidikan di negara kita tercinta ini. Di bagian pembuka saya melihat penulis mencoba menyajikan dua hal berbeda yaitu, idealisme dan realita. Tentang idealisme, penulis mengemukakan kembali konsep pikir tentang sejatinya pendidikan yang dilahirkan oleh bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Sementara pada sisi realita, pembaca dapat menemukan kenyataan-kenyataan buramnya potret pendidikan yang kita miliki. Penulis mengemukakan kembali hal-hal pilu yang terjadi dan terpublikasi melalui koran-koran nasional, termasuk beberapa peristiwa tragis yang dialami oleh pelajar-pelajar kurang beruntung dan keluarganya.

Pemaparan tentang realita di negara kita dilanjutkan dengan mempertanyakan kemana sebetulnya kiblat pendidikan kita. Penulis memperlihatkan keberadaan berkembangnya pendidikan di beberapa negara, mulai dari tetangga-tetangga kita sampai ke negara-negara barat, yang ternyata memiliki landasan filosofis yang tidak berbeda dengan kita.

Sayang sekali, kita tidak cukup memiliki komitmen dan konsistensi yang kuat untuk membangun pendidikan kita diatas landasan

yang sudah secara elegant dan smartnya diletakkan oleh tokoh-tokoh pendidikan kita. Alhasil, kita masih harus mencari kiblat. Padahal itu tidak perlu dilakukan. Saya mencoba menangkap apa yang ingin disampaikan oleh penulis pada bagian ini, bahwa kita, yang mestinya menjadi kiblat negara-negara yang sudah cukup maju paling tidak bagi Singapura dan Malaysia, kini malah seperti kembali ke titik nol. Kita meninggalkan fondasi ideal yang sudah ada dan mendirikan bangunan lain tanpa fondasi ibarat bangunan bongkar pasang. Pemikiran ini terlihat dari ulasan penulis tentang Kurikulum Berbasis Bingung (KBB) di halaman 25. Benar, tidak ubahnya dengan sebuah bangunan bongkar pasang. Mulai dari kurikulum yang diberlakukan pada tahun 1975, CBSA, KBK dan sekarang KTSP. Besok, ketika Menteri Pendidikan diganti, entah apalagi kurikulumnya. “Siswa seakan-akan menjadi kelinci percobaan...”, kata penulis di halaman yang sama.

Semua realita itu melahirkan asumsi-asumsi kuat tentang bagaimana pembodohan itu terbangun. Dan secara cerdas penulis melihat bahwa mekanisme pembodohan itu linier alurnya dengan proses pendidikan dimana hulunya adalah dari rumah. Disadari atau tidak, pembodohan itu terjadi pula di rumah, sebagai lembaga yang paling responsible untuk pendidikan anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, perilaku penyisipan amplop kepada guru, pemaksaan kehendak

orang tua terhadap anak dalam memilih bidang studi lanjutan, himpitan ekonomi yang menjadikan anak sebagai mesin pencetak koin-koin rupiah bagi keluarga sampai pada pola mendidik yang penuh kekerasan dianggap penulis sebagai bentuk pembodohan yang diciptakan sendiri oleh orang tua. Hal yang tidak banyak disadari oleh khalayak bahkan oleh mereka yang melahirkan sendiri para korban pembodohan itu.

Beranjak dari rumah, penulis melihat perilaku pembodohan itu ada pula di sekolah. Sangat ironis dan miris, bahwa ternyata, lembaga yang seyogyanya mengemban misi membuat orang menjadi pintar, justru membodohkan! Di dalam masyarakat pun perilaku pembodohan ada. Begitu pula dalam tubuh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.

Tidak hanya berhenti pada titik mengkritisi, penulis juga secara vulgar menawarkan alternatif-alternatif solusi yang cukup practical untuk dilakukan oleh semua pihak baik orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam rangka menghapus perilaku-perilaku pembodohan. Tantangan terbesar pendidikan sebagai sistim dan institusi ke depan adalah sejumlah kecenderungan globalisasi. Penulis memunculkan sebuah pertanyaan kritis: “Mampukah praktek pendidikan kita menghasilkan lulusan dengan kualitas yang memadai untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan globalisasi

itu?” Reformasi pendidikan dengan paradigma baru dalam pengelolaan sekolah adalah jawabannya yang ulasanya dapat ditemukan dibagian-bagian penutup buku ini.

Sebagai seorang akademisi, Penulis cukup bijak mengemas pikiran dan semua sumber informasi maupun data yang dimiliki menjadi kemasam bacaan yang walaupun terkesan cukup berat, namun sebetulnya sangat mudah untuk dicerna oleh semua kalangan.

Semua orang pemakai jasa pendidikan, mesti memahami dengan benar dan mengamati – mengawal dengan cermat proses hidup-menghidupkan pendidikan di tanah air kita. Oleh karena itu, isi buku ini sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi. Selain itu, buku ini cocok menjadi bahan evaluasi diri bagi semua pemangku kepentingan maupun pelaku pengembangan pendidikan atau sebagaimana penulis gunakan di halaman 86, dalang dan pelakon pendidikan. Lebih jauh, buku ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat luas untuk bekerja bersama menghilangkan satu per satu fatamorgana yang ada di dunia pendidikan kita.

***Alumni IFP Indonesia Cohort 1, juga peneliti dan Konsultan pada Lembaga InDev.**

be one of us!

Jadilah bagian dari perubahan keadilan sosial dengan menjadi volunteer sebagai koresponden dan kontributor Social Justice Magz.

Anda berminat?

Hubungi kami di bagian redaksi (021) - 8006458 atau hubungi Rafianti +62812 8361 1325

BOOK



Kisah Inspiratif Penerima Beasiswa ke Luar Negeri

Kisah-kisah dalam buku ini menunjukkan tidak ada hambatan yang terlalu tinggi atau sulit selama kita memiliki semangat kemauan dan kerja keras untuk mencapai apa yang kita impikan. Kita sendiri yang menentukan sukses yang dapat kita capai.

Andy F. Noya, Host "**Kick Andy**"

Segera dapatkan buku **Menerjang Batas Mengejar Impian** di toko buku Gramedia, toko buku Gunung Agung, toko buku Tiga Serangkai, dan toko buku terkemuka di kota Anda.

GRATIS!

Jakarta: Rabu, 3 Oktober 2012

17:00-20:00 WIB

Ballroom, Grand Hyatt Hotel

Jl. M.H. Thamrin - Jakarta

Surabaya: Sabtu, 6 Oktober 2012,

14:00-17:00 WIB

Nirwana Room, Shangri-La Hotel

Jl. May. Jend. Sungkono 120 - Surabaya

Hanya sekali setahun!

Pameran pendidikan yang selalu ditunggu-tunggu

Menampilkan perwakilan langsung (**BUKAN AGEN**)
dari lebih dari 50 universitas terkemuka di Amerika Serikat

Informasi berbagai **BEASISWA**

Informasi **TOEFL® & GRE®**

FREE WORKSHOP (Jakarta only)

Write Your Way to Success:

How to Write Statement

of Purpose and Study Objective

Krakatau Room, 14:00 - 16:00 WIB

Limited Seats ! Register Now !

Tersedia doorprize

Info lebih lanjut,

hubungi IIEF:

Telp: (021) 831 7330

ext. 113, 103, 114, 116

Email: iief@indo.net.id

Blog: iiefedufair.wordpress.com



Organized by:

International Media Partner

Sponsored by:



INSTITUTE OF
INTERNATIONAL
EDUCATION

International Herald Tribune
THE GLOBAL EDITION OF THE NEW YORK TIMES



TOEFL and GRE Tests



Indonesian
International
Education
Foundation

The **Indonesian International Education Foundation (IIEF)** is an Indonesian not-for-profit organization that is committed to promoting the development of the Indonesian people through international education. Established in 1982, IIEF has developed expertise in four core areas: Scholarship and Fellowship Management; Capacity Development Initiatives; Services to Education; and Testing and Certification.



Improving the capacity of Indonesian individuals and organizations to successfully address the local and global challenges.

Developing, implementing, and branding world-renowned global scholarship initiatives.



Delivering broad range of high-quality, tailor-made education support and services.

Administering a variety of admissions test to support applications to universities abroad.

Contact Us:

Menara Imperium, 28th Floor, Suite A-B
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1, Kuningan
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
T: (62-21) 831-7330 **F:** (62-21) 831-7331
E: iief@indo.net.id **W:** www.iief.or.id